

S E J A R A H
SURAT PERINTAH 11 MARET
1966

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SURAT PERINTAH 11 MARET 1966



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

DIT. SEJARAH 2. KEC. TRADISIONAL

Nomor induk : 250 / 6000
Tanggal terima : 21-6-89
Tanggal catat : 22. 6- 89
Beri/hadiah dari : 105N
Nomor buku :
Kopi ke : 3

Penyunting :
Riyadi Gunawan

Tim Redaksi :

Saleh A. Djamhari
Amrin Imran
Ariwiadi
Sutopo Sutanto
Susanto Zuhdi.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1986.

Direktur Jenderal Kebudayaan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Soebadio'.

Prof. Dr. Haryati Soebadio.

NIP. 130119123.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
AB I. LATAR BELAKANG PERISTIWA	
1. Dari Madiun ke Lubangbuaya	1
2. Kekuatan-kekuatan Orde Baru	13
3. Bangkitnya Kekuatan Orde Baru	19
4. Dialog Sukarno – Soeharto	31
BAB II. LAHIRNYA SURAT PERINTAH 11 MARET	
1. Sidang Kabinet yang gagal	41
2. Pembicaraan di istana Bogor	51
3. Breifing malam hari di Markas KOS- TRAD	56
BAB III. MEMASUKI ERA ORDE BARU *	
1. Penggunaan Surat Perintah 11 Maret 1966	61
2. Pembentukan Kabinet "Peralihan" ...	74
3. Peningkatan SP 11 Maret menjadi kete- tapan No. IX Tahun 1966 MPRS	78

LAMPIRAN :

1. Pernyataan	85
2. Susunan Kalimat yang disempurnakan	86
3. Perintah Harian	92
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi No. 1/3/1966	95
5. Salinan Pengumuman No. 5	98
6. Susunan Kabinet Dwikora yang telah disempurna- kan lagi	101
7. Pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indone- sia : 5 Mei 1966	104
8. Ketetapan Pemerintah Tentang Surat Perintah 11- 3-1966	107
9. Pernyataan Angkatan Bersenjata Republik Indone- sia, Pimpinan Angkatan Bersenjata R.I. 24 Feb- ruari 1967	110

DAFTAR SUMBER

A. Wawancara	112
B. Surat kabar/Majalah	113
C. Penerbitan-penerbitan Resmi	113

BAB I

LATAR BELAKANG PERISTIWA

1. Dari Madiun ke Lubangbuaya

Kamun komunis Indonesia menganggap bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mereka sebut dengan "Revolusi Agustus", telah gagal karena tidak sesuai dengan garis perjuangan, yakni garis Dimitrov. ²⁾ Garis itu mencanangkan bahwa perjuangan kaum komunis di dunia di dalam menghadapi kekuatan fasisme internasional (Italia, Jerman dan Jepang) diharuskan bekerjasama dengan kaum kapitalis Barat, Yaitu Amerika Serikat dan sekutunya di Eropah. Berdasarkan garis perjuangan itu dapat dimengerti jika pada awal kemerdekaan, orang-orang komunis Indonesia memperlihatkan sikap yang lunak terhadap kolonialisme Belanda. Di samping itu juga organisasi komunis Indonesia belum tersusun dengan baik, kebanyakan tokoh-tokohnya masih berada di luar negeri, akibat pemberontakan PKI pada tahun 1926-27. Dalam keadaan demikian terdapat kelompok-kelompok yang tidak mengikuti garis resmi komunisme internasional. Salah satu kelompok ini adalah yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf.

Pada tanggal 21 Oktober 1945 di Cirebon, ²⁾ ia mendirikan kembali PKI di pentas kehidupan politik Indonesia. Ia dan kelompoknya memisahkan diri dari garis kiri yang lunak dan kompromistis, bahkan melakukan aksi-aksi anti pemerintah dan revolusi sosial di Jawa Barat (Cirebon) dan Jawa Tengah ³⁾ (Tegal Brebes, Pekalongan). Pada 12 Februari 1946 para pengikutnya mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah RI di Cirebon. Mereka menduduki asrama Polisi Militer dan mendesak Tentara Keamanan Rakyat ke luar kota. Residen Cirebon dan para pemimpin daerah setempat ditangkap. Akhirnya gerakan itu dapat ditumpas oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dipimpin Letkol Mufræni Mukmin, dan Mohammad Yusuf berhasil ditangkap. ⁴⁾

Perkembangan selanjutnya, ketika para tokoh komunis berdatangan kembali dari luar negeri, keinginan untuk mempersatukan kembali kekuatan komunis di Indonesia memperlihatkan gejala yang meningkat. Kebutuhan akan hal itu bukan saja dirasakan untuk memperkuat gerakan-gerakannya, melainkan juga untuk menata kembali organisasi, dalam rangka menjalankan garis resmi komunis internasional. Sardjono, kembali dari Australia pada bulan **Maret 1946**, **disusul kemudian oleh Alimin** dari Yenan (Cina Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1946, sesudah ia berada di sana selama 20 tahun. Ada juga yang datang dari negeri Belanda, yakni para mahasiswa yang beraliran komunis. Tokoh-tokoh muda komunis ini adalah Abdulmadjid, Setiadjit dan Maruto Darusman. Mereka yang kembali pada akhir 1945 dan awal 1946 ini mendapat bantuan transportasi cuma-cuma dari pemerintah Belanda. Mereka inilah yang menganjurkan kepada RI untuk melakukan kompromi saja dengan Belanda, dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia-Belanda.

Untuk mengembangkan pengaruhnya Setiadjit masuk ke dalam Partai Buruh, sedangkan Abdulmadjid masuk ke Partai Sosialis dan **Maruto Darusman masuk ke PKI. Maruto kemudian pada tahun 1947 terpilih menjadi Menteri Negara di dalam kabinet Amir Syarifuddin. Tokoh lainnya Tan Ling Djie ber-**

gabung ke Partai Sosialis, sedangkan Wikana, pemimpin muda PKI masuk ke Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Suatu organisasi para-militer yang dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 10 November 1945. Pada bulan November 1946, ketika kelompok-kelompok buruh direorganisasi ke dalam Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), kepemimpinannya sudah dikuasai orang-orang komunis di antaranya Hardjono, Njono dan Oey Gee Hwat.

Sejalan dengan itu kaum tani juga dihimpun dalam wadah Barisan Tani Indonesia (BTI), sehingga secara rahasia kaum komunis dapat menguasainya.⁵⁾

Pada bulan Mei 1947, semua kekuatan "kiri" telah tergabung dalam Sayap Kiri yang terdiri atas partai sosialis dan partai buruh, secara nyata telah menjadi bagian dari PKI. Akibat oposisi dari kelompok Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya, ditambah lagi pengunduran dari kelompok sayap kiri yang menyebabkan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947 menyerahkan mandat sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno.

Presiden menyadari meningkatnya ancaman Belanda untuk melakukan aksi militer. Ia mengusulkan agar partai-partai besar : Masyumi, Nasionalisme, Sosialisme dan Buruh menggabungkan kekuatannya untuk membentuk pemerintah persatuan nasional. Persoalan lain muncul ketika Masyumi menolak bekerjasama dengan kaum komunis. Akan tetapi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), unsur dari Masyumi menyatakan bersedia. Maka terbentuklah kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947, menggantikan kabinet Syahrir.

Pada awalnya Kabinet Amir masih memberlakukan garis Dimitrov yang moderat, segera melanjutkan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda di dalam menyelesaikan konflik, mengenai siapa yang mempunyai kekuasaan secara *dejure*, atas wilayah bekas Hindia Belanda. Hasil dari upaya diplomasi Amir Syarifuddin dengan pihak Belanda adalah ditandatangani-

nya persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Selama berlangsungnya perundingan sampai dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak, terjadi pergantian garis komunis internasional. Pada bulan September 1947 garis front populer, yaitu garis yang membenarkan kerjasama dengan kapitalis-imperialis, telah ditinggalkan, diganti dengan "garis keras". Perubahan garis ini disusul dengan munculnya gerakan-gerakan kaum komunis di Asia Tenggara untuk merebut kekuasaan.

Di Benua Eropah, Amerika Serikat membentengi dari ancaman komunisme dengan apa yang disebut *Marshall Plan*, melalui bantuan berupa perbaikan ekonomi dan stabilitas politik di wilayah itu. Stalin bereaksi dengan menegaskan strategi ofensif. Pada saat terbentuknya Communist Information Bureau (Cominform) di Warsawa, 22 September 1947, diumumkan adanya dua blok di dunia berdasarkan ideologi : blok imperialis-kapitalis yang dipimpin Amerika Serikat dan blok anti imperialis-kapitalis yang "demokratis" yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Garis komunis ini berpedoman dari doktrin Zhdanov ⁶⁾ yang secara tegas menyatakan bahwa kaum komunis tidak boleh lagi melakukan kerjasama dengan kekuatan kapitalis-imperialis. Perjuangan kaum komunis untuk menghadapi lawannya itu, harus didahului dengan menguasai kekuatan-kekuatan nasionalis di semua negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia. Sejak saat inilah dimulainya persaingan antara negara-negara adikuasa di dalam memperoleh sekutunya masing-masing.

Tokoh komunis terakhir yang datang di Indonesia adalah Musso, dari Moskwa. Ia tiba di Yogya pada tanggal 10 Agustus 1948. Ia segera melakukan tindakan-tindakan politik yang merupakan penerapan doktrin Zhdanov bagi komunis di Indonesia. Musso mengoreksi tindakan orang-orang komunis di masa lalu, dengan memperkenalkan tesis "jalan baru", ia menyalahkan tindakan Amir Syarifuddin dengan Renvillanya. Musso juga mengecam politik Sukarno-Hatta dan menuduh mereka sebagai penjual negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh akibat tindakan-

tindakan Amerika Serikat, yang dinilai oleh kaum komunis lebih dekat pada Belanda, daripada kepentingan Indonesia. Hasil-hasil Komisi Jasa-jasa Baik (Komite Tiga Negara) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan peranan Amerika Serikat di dalamnya, dipandang tidak menguntungkan kepentingan komunis, khususnya kepentingan Uni Soviet.

Di sini terlihat bahwa masalah itu tidak berdiri sendiri tanpa terkait dengan strategi global Uni Soviet. *Kremlin* dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bagi wilayah jajahan tidak pernah akan dapat diperoleh sebelum dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di Barat diganti oleh Rusia.⁷⁾ Dalam konteks itulah Musso mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia barulah dianggap benar apabila masuk ke dalam kubu kaum komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada berbagai tempat dan kesempatan ia menuduh Sukarno-Hatta "menjual" bangsa Indonesia kepada pihak imperialis-kapitalis (Belanda). Saat Presiden Sukarno menawarkan alternatif kepada Rakyat, untuk memilih dirinya bersama Hatta yang akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau memilih Musso, yang akan membawa bangsa ke jurang kehancuran, rakyat tetap memilih Pemerintah Sukarno-Hatta.

Dilihat dari aspek perkembangan sikap politik luar negeri RI, di sinilah untuk pertama kali batu ujian harus dijawab. Syahrir telah lebih dahulu mengemukakan pendapat dan sikapnya mengenai perjuangan sosialis Indonesia tidak harus ditempatkan pada kepentingan negara manapun. Sebaliknya Amir Syarifuddin dengan kelompok Sayap Kiri memisahkan diri dari kelompok Syahrir. Syahrir menyatakan bahwa sikap Indonesia harus memilih sikap netral yang positif (*positive neutrality*)⁸⁾. Hatta menyatakan bahwa pendirian pemerintah adalah supaya bangsa Indonesia tidak menjadi objek pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia Merdeka.⁹⁾

Sementara itu Musso mengambil alih pimpinan komunis Indonesia, berlandaskan pada tesis "jalan baru"-nya. Ia mempersatukan partai-partai yang berazas Marxisme-Leninisme, di dalam satu partai. Selanjutnya ia membentuk Front Persatuan Nasional yang dikendalikan dia sendiri. Konsepsi itu dilaksanakan dengan patuh oleh Amir Syarifuddin, Setiadjit dan kawan-kawannya sehingga semua partai dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) bergabung dengan PKI.

Untuk merongrong pemerintah Hatta, diciptakan berbagai kerusuhan di Surakarta. Pengikut FDR melakukan aksi-aksi teror, yaitu dengan menculik, dan membunuh lawan politiknya. Kota Solo dan sekitarnya dijadikan "Wild west", daerah kacau. Sebuah dokumen yang ditemukan di rumah Amir Syarifuddin, memperkirakan bahwa 35% dari angkatan Perang dapat dikendalikan PKI untuk dapat melaksanakan perebutan kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, dilaksanakan dengan strategi dua tahap. Pertama, perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara-cara perlemeter yaitu dengan mempercepat pembentukan Front Nasional. Wadah ini yang akan melancarkan kampanye besar-besaran untuk membubarkan kabinet Hatta. Jikalau cara ini gagal maka tahap kedua, yaitu tahap non parlementer, yaitu dengan jalan kekerasan atau pemberontakan bersejanta untuk mengambil alih kekuasaan. Strategi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 18 September 1948 dari Madiun. Pada tanggal 30 September, pemberontakan sudah berhasil dipadamkan. Madiun pusat kekuatan pemberontakan berhasil diduduki. Operasi pembersihan dilanjutkan selama dua bulan untuk menghancurkan sisa-sisa pemberontak. Bagi bangsa Indonesia, pemberontakan PKI dari Madiun sukar dilupakan, sebab pada saat bangsa Indonesia sedang menghadapi Belanda justru orang-orang komunis "menusuk dari belakang".¹⁰⁾ Interaksi ini merupakan benang merah yang kemudian menjelajahi kejadian-kejadian sejarah sampai dengan G.30.S/PKI 1965.

Pemimpin pemberontak Musso, Amir Syarifuddin, dan beberapa tokoh lainnya, berhasil ditangkap atau tertembak mati.

Tokoh-tokoh muda lain seperti Aidit, MH. Lukman, Njoto dapat lolos dari usaha pembersihan. Mereka melarikan diri ke luar negeri. Di lain pihak sukses Republik di dalam menumpas pemberontak dalam waktu singkat membawa kesan yang baik di mata dunia khususnya, Amerika. Kenyataan ini berakibat terban-tahlah semua isu yang dilansir oleh Belanda, bahwa Republik adalah negara yang kacau. Kenyataan ini memberikan dampak positif terhadap sikap delegasi Amerika Serikat yang menangani konflik Indonesia-Belanda. Mereka tidak menyembunyikan simpatinya kepada Republik.¹¹⁾ Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI, 27 Desember 1949, maka periode sejarah politik Indonesia sampai dengan tahun 1959 diwarnai dengan jatuh bangunannya kabinet. Pada masa inilah PKI berusaha mengkonsolidasi kekuatannya. Dengan taktiknya yang klasik, mula-mula orang-orang komunis tidak menampilkan dirinya secara terang-terangan. Begitu juga PKI belum berani menyatakan diri sebagai partai legal dan terbuka. Kader-kader mereka menumpang pada partai-partai yang beraliran Sosialis dan Buruh. Kegiatan-kegiatan mereka terkadang masih dilakukan secara bawah tanah.

Bulan Juli 1950 Aidit kembali lagi setelah melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Pada tanggal 7 Januari 1951 Central Komite PKI memilih Politbiro baru dengan 5 orang anggota yakni Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, dan Alimin. Tokoh inilah yang memimpin PKI sampai dengan kehancurannya sesudah kudeta melalui apa yang disebut sebagai gerakan 30 September 1965.

Untuk membangun kembali kekuatannya Aidit dkk, membuat analisa : *pertama*, strategi PKI harus berjangka panjang, mengingat tidak mungkin PKI akan mendapat tempat di antara kekuatan politik lain, sebagaimana sebelum pemberontakan Madiun. *Kedua*, usaha meluaskan kekuatan dengan membentuk organisasi-organisasi massa, seperti : Buruh, Tani, Seniman, Mahasiswa, Wanita, Veteran.

Sasaran pembinaan kekuatan adalah buruh, SOBSI berhasil dikonsolidasi dan kemudian melancarkan kampanye menuntut

hak-haknya kepada pemerintah. Di bawah pimpinan Nyono, aksi-aksi SOBSI itu terus berkembang. Situasi Indonesia pada tahun 1950 sudah masak bagi agitasi yang tangguh dari kaum buruh. Keresahan buruh dimanfaatkan sebagai pijakan tuntutan kepada Pemerintah. Pada bulan Agustus 1951, muncul aksi-aksi pemogokan buruh di beberapa tempat, misalnya Tanjung Priok dan Bogor. Pemerintah di bawah Perdana Menteri Sukiman, memerintahkan pada tanggal 11 Agustus kepada tentara untuk melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat aksi-aksi itu.¹²⁾

Pada saat-saat tertentu partai komunis di manapun dapat menganut strategi "kanan" atau "kiri". Strategi kanan artinya mengharuskan dilakukannya rangkulan taktis terhadap kaum borjuis begitu pula melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang menjadi musuhnya termasuk kaum imperialis-kapitalis. Strategi ini mengharuskan adanya sikap kompromistis. Strategi "kiri" mengambil jalan keras, tidak mengenal kompromi dan tindakan yang paling jauh adalah kekerasan dan perang. Pilihan atas kedua strategi itu tentu saja dipertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisinya.

Perubahan strategi PKI setelah pemberontakan Madiun, dari "Kiri" ke "kanan" tertuang di dalam Konferensi Nasional PKI pada bulan Januari 1952. Di dalam forum itu DN Aidit mengemukakan konsepnya untuk membentuk suatu Front Nasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana cara PKI untuk merangkul semua kekuatan nasional lainnya. Pada masa kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953) PKI mulai lebih berani menampakkan dirinya ke panggung politik Indonesia. Langkah-langkah itu terlihat ketika PKI berusaha mendekati Presiden Sukarno. Di samping itu PKI mendekati PNI untuk memperoleh teman yang seolah-olah juga memperjuangkan kepentingan nasional. Ketika masalah Irian Barat menjadi isu sentral sampai kampanye untuk pembebasan wilayah itu, PKI dengan serta merta mengidentifikasi ke dalam kampanye itu.¹³⁾ Berangkali upaya-upaya di atas

dapat untuk menerangkan hasil PKI di dalam Pemilihan Umum tahun 1955, yang memperoleh suara 6 juta (16,4%), sehingga menempatkan dirinya nomor 4, setelah PNI, Masyumi dan NU.

Upaya PKI dalam memperoleh kekuatannya kembali dan bahkan di dalam menggalang dengan kekuatan-kekuatan lain dilakukan dengan cara sistematik dan konsepsional. Cara-cara penggalangan melalui parlemen ter adalah perwujudan Front persatuan dari "atas". Dari "bawah" adalah mengorganisasi kekuatan massa. Strategi ini dijalankan dalam jangka panjang. Pendekatan dari "atas" misalnya ketika PKI mendukung berbagai program kabinet Ali Sastroamidjojo I, serta terhadap gagasan Presiden Sukarno. Di lihat dari luar, tampak adanya kerjasama antara PNI, NU dan PKI. ¹⁴⁾

Bidang bersenjata merupakan aspek yang tidak diabaikan. Untuk menyusun strategi perjuangan PKI, di dalam Kongresnya Ke 5 pada 1954, ditetapkan strategi yang disebut *Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan* (MKTBP). Strategi ini meliputi : *Pertama*, perjuangan gerilya di desa-desa yang didukung oleh kelas petani miskin. *Kedua*, perjuangan revolusioner di kota-kota oleh kelas buruh, terutama para pekerja di bidang alat transportasi. *Ketiga*, merupakan sasaran dengan upaya yang intensif adalah menamakan paham komunisme di kalangan tentara (ABRI) baik secara tertutup maupun terbuka.

Kegagalan sistim demokrasi liberal, mendorong Presiden Sukarno menyodorkan "konsepsi"-nya pada 21 Februari 1957, sejak saat itu sampai dengan 1965, merupakan masa demokrasi terpimpin. Periode ini ditandai dengan jatuhnya peranan partai politik dan institusi-institusi parlementer, meningkatnya peranan TNI, dan berkembangnya kekuatan PKI, serta dominasi pengaruh Presiden Sukarno yang sangat nyata. ¹⁵⁾

Pada awal periode ini Presiden Sukarno mengumumkan berdirinya Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari kelompok-kelompok fungsional, termasuk 12 orang yang dikenal

sebagai komunis dan simpatisannya. Wakil-wakil itu terdiri dari SOBSI, BTI, LEKRA, Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepsi), Gerwani, dan Pemuda Rakyat. Yang pada prinsipnya telah mewakili golongan-golongan fungsional seperti : buruh, tani, seniman, veteran, wanita dan pemuda, yang merupakan basis kekuatan PKI.

Dalam perkembangan selanjutnya PKI sudah berhasil mempengaruhi Presiden Sukarno. Aidit kemudian menawarkan untuk membangun kekuatan bersama dengan semangat kerjasama dengan partai untuk mendukung konsepsi Presiden. Akan tetapi PNI, mencela kerjasama macam itu. Bahkan pada 5 Agustus 1958, menuduh PKI sebagai partai yang bermuka dua. Separuh pemimpinnya berada di Moskow dan separuh lagi di Indonesia. ¹⁶⁾

Dalam suasana kembali ke UUD'45, Presiden Sukarno menegaskan lagi konsepsinya, yang disampaikan pada pidato 17 Agustus 1959 yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato itu dikenal dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, atau Manipol. Manipol kemudian diserahkan kepada panitia kerja DPA (Dewan Pertimbangan Agung) untuk dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN. Ketua panitia itu adalah DN. Aidit, yang menjabat juga sebagai ketua CC PKI. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkan program-program PKI, dengan mempertautkan tesis PKI *Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)*, yang ia tulis 1957, Artinya, Kepentingan PKI sudah tertampung dalam GBHN yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Konsepsi gotong royong nasional yang memang dikehendaki PKI. ¹⁷⁾ Dan berhasilnya dikembangkan mencakup semua kelompok, nasionalis, kelompok agama dan komunis sehingga menjadi Nasakom.

Berlandasan hal itu PKI makin dapat memperluas dan memperkuat pengaruhnya di dalam masyarakat Indonesia. TNI-AD, dianggap sebagai lawan utama. Di dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, PKI menuduh TNI-AD tidak dengan

seungguhnya. Bersamaan dengan itu PKI mengadakan pengacauan di tiga daerah, yakni Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Peristiwa itu dikenal dengan Peristiwa Tiga Selatan.¹⁸⁾ Pimpinan AD lalu menyampaikan saran agar tidak terlalu percaya pada kesetiaan PKI, akan tetapi ditanggapi oleh Presiden Sukarno dengan imbauan jangan bersikap *fobi* terhadap PKI.

Tanda-tanda Indonesia makin condong ke kiri tambah terasa menjelang pertengahan 1964, karena itu Presiden Sukarno senang sekali, menggunakan terminologi revolusi dua tahap. Menurutnyanya "kita telah dapat menghentikan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme dan feodalisme. Kita memasuki tahap kedua, sosialisme Indonesia". Dalam kamus Marxisme-Leninisme, kata "sosialisme" adalah sebutan halus dari komunisme.¹⁹⁾ Tahun itu merupakan awal dari ofensif PKI terhadap lawan-lawannya, secara sistematik dan berulang-ulang PKI melancarkan tuduhan kontra-revolusi, anti Pancasila, anti-Manipol, anti-Pemimpin Besar Revolusi terhadap lawan-lawannya. Sebaliknya untuk mengimbangi hal itu kelompok nasionalis dan agama membentuk Badan Pendukung Sukarno (BPS), namun Presiden Sukarno pada 17 Desember 1964 membubarkan organisasi itu.

Sementara itu di tingkat pedesaan, aktivitas PKI dengan basis kekuatan organisasi massa-nya, secara terbuka mengadakan uji coba menghadapi lawan-lawannya. Sejalan dengan pelaksanaan Manipol di bidang *landreform*, dengan dalih bahwa kegiatan itu adalah progresif revolusioner, masa tani mengadakan aksi sepihak, merebut tanah yang dikuasai pemerintah, merubah perkebunan-perkebunan dan sebagainya.²⁰⁾ Pada 15 Januari 1965 terjadi aksi anggota BTI di desa Gayam, Kediri. Mereka menyerang seorang petani dan lurah desa itu, dengan alasan bahwa tanah itu dalam sengketa. Peristiwa lain di desa Kanigoro, pemuda Rakyat di sana telah menyerbu dan mengeroyok anggota Pemuda Islam Indonesia (PII).

Pada bulan Januari 1965, di tengah-tengah suasana konfrontasi dengan Malaysia, PKI berusaha untuk memperoleh senjata. Aidit mengusulkan kepada Sukarno agar pemerintah mempersenjatai 5 juta orang buruh dan tani. Lebih jauh PKI mengusulkan adanya "angkatan kelima". TNI-AD segera menolak adanya ide pembentukan itu. Faktor yang mendorong timbulnya konflik yang makin tajam antara fihak PKI dan lawannya terutama TNI-AD, di mana Presiden Sukarno berada pada fihak yang lebih dekat kepada yang pertama, adalah masalah "angkatan kelima" itu dan soal kesehatan Presiden sendiri. Peristiwa yang menyangkut sakitnya Presiden inilah yang kemudian mendorong Aidit kemudian mengambil sikap untuk segera melancarkan kudeta.

Desus-desus paling berpengaruh yang diciptakan oleh PKI adalah adanya "Dewan Jenderal" yang hendak mengambil kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Sementara itu persiapan PKI untuk kudeta ada hubungannya dengan makin parahny kesehatan Presiden Sukarno. Aidit membuat penilaian pada 28 Agustus dan diterima serta disetujui oleh Politbiro CC-PKI dan Dewan Harian CC-PKI, maka sejak itu dimulailah persiapan pemberontakan. Beberapa kesimpulan yang diambil adalah untuk mendahului "Dewan Jenderal", dengan perhitungan kekuatan militer lebih menguntungkan PKI. Hal ini didasarkan atas : pertama, AD dinilai tidak kompak, kedua, adanya perwira-perwira yang berpikiran maju.²¹⁾ Gerakan yang akan melakukan kudeta ini diberi nama Gerakan 30 September atau G.30.S.

Atas dasar pertimbangan itulah pada dini hari 1 Oktober 1965 di Jakarta, G.30.S melancarkan tindakan untuk melumpuhkan Angkatan Darat. Dalam daftar rencana mereka terdapat 7 orang Jenderal yang harus dibawa hidup atau mati ke Lubangbuaya. Mereka yang kemudian menjadi korban adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprpto, Mayjen Haryono MT, Mayjen S. Parman, Brigjen Sutojo Siswomihardjo dan Brigjen D.I. Pandjaitan, sedangkan Jenderal A.H. Nasution dapat lolos dari aksi itu. Akan tetapi seorang puterinya, Ade Irma Suryani meninggal

dunia dalam peristiwa itu. Di samping itu korban lainnya adalah Letnan Satu Piere Tendean dan Pembantu Letnan Polisi Karel Satsuit Tubun,.

2. Kekuatan-kekuatan Orde Baru.

Usaha PKI untuk mendirikan pemerintahan Komunis di Indonesia dengan jalan melakukan pembunuhan terhadap para pimpinan TNI Angkatan Darat gagal. Pada mulanya pimpinan PKI sempat menduga bahwa gerakannya berhasil, setidaknya sampai pukul 07.00 pagi saat Letkol Untung Komandan Gerakan 30 September menyiarkan pengumuman pertama tentang penangkapan para Jenderal, hingga pukul 13.00 saat G.30.S/PKI mengumumkan Dekrit No. 1 serta Keputusan No. 1 dan No. 2. Isi Dekrit No. 1 adalah tentang Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan negara dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Isi Keputusan No. 1 tentang pembentukan dan Susunan Dewan Revolusi Indonesia. Isi Keputusan No. 2 tentang penurunan pangkat bagi Kolonel ke atas menjadi Letnan Kolonel, dan kenaikan pangkat bagi mereka yang ikut aktif dalam G.30S/PKI. Namun harapan-harapan keberhasilan gerakan itu tidak berlangsung lama dan pudar, karena beriringan dengan harapan-harapan itu telah bangkit kekuatan yang selalu waspada terhadap usaha-usaha PKI yang akan merobah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kekuatan yang senantiasa waspada terhadap usaha-usaha yang akan merobah negara Republik Proklamasi itu adalah Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Setelah pagi hari tanggal 1 Oktober menerima laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, dengan naluri yang kuat serta pengalamannya, Mayor Jenderal Soeharto memperoleh firasat bahwa gerakan itu dilakukan oleh PKI. Firasat itu menjelma menjadi dugaan yang semakin kuat setelah adanya pengumuman dari Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan Gerakan melalui siaran RRI pada pukul 07.00 pagi. Dugaan tersebut menjadi semakin jelas setelah gerakan itu mengadakan siaran tentang Dekrit No. 1 dan Keputusan No. 1 dan No. 2 melalui RRI pada pukul 13.00 ²²⁾ Isi

dekrit itu menjadi jelas bahwa G.30.S adalah suatu pemberontakan yang memfitnah pimpinan TNI Angkatan Darat dengan dalih akan merebut kekuasaan negara. Melalui cara demikian, PKI berharap dengan sekali pukul dapat melumpuhkan kekuatan yang gigih membela Pancasila dan selalu melawan komunisme, serta sekaligus dapat merebut kekuasaan negara. Memang dengan operasi pendekatan yang dilakukan gerakan itu berhasil membungkam rakyat untuk beberapa waktu. Akan tetapi Panglima Kostrad Mayjen Soeharto segera bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Langkah pertama adalah melakukan koordinasi dengan kesatuan-kesatuan ABRI melalui Panglima-panglima Angkatan, kecuali dengan Menteri/Panglima Angkatan Udara Omar Dhani yang mendukung G.30.S/PKI.

Setelah menilai keadaan yang berkembang waktu itu terutama dari pengumuman-pengumuman tersebut di atas, Pangkos-trad berkesimpulan bahwa :

- a. Penculikan dan pembunuhan terhadap perwira-perwira tinggi angkatan Darat adalah merupakan bagian dari usaha perebutan kekuasaan pemerintahan.
- b. Pimpinan Angkatan Udara membantu pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September.
- c. batalyon 454/Diponegoro dan Batalyon 530/Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka disalah gunakan oleh G.30.S.²³⁾

Sementara itu Presiden Sukarno sejak pukul 09.00 berada di Halim Perdana Kusumah setelah membatalkan niat pertamanya menuju ke Istana Negara. Pada malam harinya Presiden menginap di rumah Ny. Sari Dewi. Pada mulanya Presiden Sukarno bermaksud menuju ke Istana Negara, namun di tengah perjalanan mendapat laporan tentang situasi yang terjadi sehingga ia menuju ke rumah Nyonya Haryati di Grogol. Dari rumah Nyonya Haryati Sukarno, Presiden memutuskan untuk menuju ke Halim, yang ternyata pangkalan itu digunakan sebagai basis Gerakan 30 September. Dalam hal ini Ketua CCPKI D.N. Aidit selaku

Pimpinan Tertinggi G.30.S. berada di Central Komando (Cenko II) di Halim dan Cenko I yang mengambil tempat di PN Aerial Survey (Penas) di tempati oleh markas Pimpinan Pelaksana Gerakan Letkol. Untung.²⁴⁾ Men/Pangau Omar Dhani ternyata berada di ruang Komando Operasi (Koops) Angkatan Udara sejak pukul 07.00 pagi dan telah menerima laporan dari Mayor (U) Suyono tentang pelaksanaan gerakan itu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Omar Dhani jelas-jelas mendukung gerakan karena sebenarnya ia telah dibina oleh Biro Khusus PKI. Presiden Sukarno pergi ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah tanpa mengetahui bahwa Pangkalan itu telah digunakan sebagai basis gerakan. Sesuai dengan rencana Presiden Sukarno dalam hal tindakan darurat jika "Dewan Jenderal" yang diisukan merebut kekuasaan maka ia segera dapat diterbangkan ke Yogyakarta. Pada waktu Presiden Sukarno memutuskan untuk tidak meneruskan ke Istana Negara, nampak adanya kebingungan. Ia belum dapat mengetahui secara pasti pihak mana yang melakukan gerakan. Ia merasa terkejut, sebab tidak menduga bahwa tindakan Untung itu disertai juga menembaki rumah Jenderal Nasution dan Jenderal Panjaitan. Sebaliknya mungkin ia juga menduga bahwa yang bergerak adalah "Dewan Jenderal" karena ia juga mendapat laporan tentang penembakan terhadap rumah Waperdam II, Dr. J. Leimena.²⁵⁾ Demikianlah ketika Mayor Jenderal Soeharto memutuskan untuk mengambil tindakan cepat untuk menguasai keadaan, ia tidak dapat mengadakan hubungan dengan Presiden Sukarno yang berada di Pangkalan Udara Halim yang dikuasai G.30.S. itu. Dengan demikian bagi Panglima Kostrad itu, Presiden Sukarno tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah untuk menguasai keadaan. Di Pangkalan Udara Halim setelah menerima laporan Brigjen Supardjo tentang gerakan yang dilancarkanya, pada kira-kira pukul 11.00 Presiden Sukarno meninggalkan ruang Koops Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah menuju rumah Komodor Susanto. Rumah yang terletak tidak jauh dari Ko.Ops itu memang disediakan untuk Presiden. Di rumah Komodor Susanto itu kemudian

Presiden mengadakan pembicaraan mengenai penunjukkan Menteri/Panglima Angkatan Darat berhubungan dengan meninggalnya Letjen A. Yani.

Rapat dimulai pukul 13.00 beberapa nama telah diajukan kepada Presiden, dan pada akhirnya Presiden Sukarno memutuskan menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodro, Asisten III Men/Pangad untuk sebagai *Caretaker* yang melaksanakan tugas sehari-hari Men/Pangad. Ia adalah salah satu nama dari dua nama yang diajukan oleh Brigjen Supardjo. Dalam pertemuan itu Presiden memutuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung dipegang oleh Presiden, sedangkan Mayjen Soeharto ditugaskan untuk melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan G.30.S. keputusan ini diumumkan melalui RRI Pusat pada tanggal 2 Oktober 1965.²⁶⁾ Keputusan yang menyangkut diri Mayjen Soeharto ini merupakan awal eksistensi Komando Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang tugas pokoknya adalah memulihkan kemanan dengan jalan operasi militer, operasi mental dan operasi politik. Mayjen Soeharto telah berkeyakinan bahwa gerakan yang dipimpin Letkol Untung itu, adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan pemerintah, maka Pangkostrad dengan berpegang pada Sumpah Prajurit memutuskan untuk segera melancarkan operasi menumpas G.30.S. Kesatuan-kesatuan yang ada padanya segera digerakan dan disertai dengan usaha menginsyafkan kesatuan-kesatuan yang terlibat dalam G.30.S. itu. Selanjutnya banyak kekuatan menjadi makin tidak menguntungkan bagi pihak gerakan yang dipimpin Letkol Untung, terutama sesudah usaha Pang Kostrad itu berhasil menginsyafkan sebagian besar Yon 454/Diponegoro dan Yon 530/Brawijaya yang dipakai G.30.S./PKI untuk mundur dari Medan Merdeka dan menggabungkan diri ke Kostrad. Dalam hal ini sejak pukul 15.00 organisasi kaum pemberontak mengalami kekacauan; komunikasi antara pimpinan gerakan mengalami kemacetan, sepanjang hari Yon 454 tidak diberi makan sehingga mengundurkan diri sepenuhnya dari pusat kota.²⁷⁾

Sesudah Presiden Sukarno selesai menentukan Caretaker Men/Pangad tersebut di atas, ia kemudian memerintahkan Kolonel KKO Bambang Widjanarko, ajudannya untuk memanggil Mayjen Pranoto. Kolonel Bambang Widjanarko tidak berhasil menemuinya, maka ia kemudian menghadap Pangkostrad Mayjen Soeharto menanyakannya. Dari mayjen Soeharto ia mendapat keterangan serta petunjuk untuk disampaikan kepada Presiden Sukarno yang berada di Halim Perdana Kusumah. Keterangan-keterangan dan petunjuk yang harus disampaikan kepada Presiden itu antara lain adalah :

- Bahwa Mayjen Pranoto tidak dapat menghadap Presiden untuk tidak menambah korban.
- Bahwa sesuai dengan tatacara tetap (standing order) kalangan TNI Angkatan Darat sekiranya Panglima Angkatan Darat berhalangan maka Panglima Kostrad yang menjabat selaku Panglima.
- Mayjen Soeharto meminta agar Kolonel Bambang Widjanarko segera membawa Presiden Sukarno ke luar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah karena Halim yang menjadi basis kekuatan G.30.S. akan diserang oleh pasukan Kostrad. ²³⁾

Setelah kembali dari Kostrad, Bambang Widjanarko menyampaikan seluruh keterangan serta pesan-pesan dari Mayjen Soeharto. Di samping itu ia juga menyampaikan apa yang disaksikannya sendiri bahwa pihak Kostrad tengah berusaha menguasai Jakarta kembali serta sedang bersiap untuk mengadakan serangan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah. Dalam suasana yang tegang mencekam Presiden Sukarno mengemukakan gagasan untuk terbang ke Yogyakarta, Laksamana Madya Omar Dhani mengusulkan agar Presdiden terbang ke Madiun. Brigjen Supardjo menganjurkan ke Bali, sedangkan Dr. Leimena menghendaki agar Presiden Sukarno jangan terbang jauh-jauh dari Jakarta. Dalam hal ini, pendapat Dr. leimena itu didukung oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa dan kolonel Widjanarko. Akhirnya pada pukul 23.00 Presiden Sukarno meninggalkan Halim

menuju Bogor dengan melalui jalan darat.²⁹⁾ Dalam pada itu pukul 19.00 Panglima Kostrad Mayjen Soeharto memerintahkan kepada RPKAD untuk merebut kembali Pusat Telekomunikasi dan RRI dengan sejauh mungkin menghindarkan pertumpahan darah. Duapuluh menit kemudian, pada pukul 19.20 perintah itu telah selesai dilaksanakan. Dengan dikuasanya kembali kedua obyek vital itu, maka sejak pukul 20.00 mulai berkumandanglah pengumuman resmi dari Mayjen Soeharto melalui RRI. Dalam siarannya itu dinyatakan tentang adanya tindakan pengkhianatan oleh apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" dan Presiden/Panglima Besar Revolusi dalam keadaan selamat. Pengumuman Jenderal Soeharto itu merupakan titik balik dalam situasi yang timbul setelah meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI. Berdasarkan pengumuman itu rakyat semakin jelas bahwa G.30.S yang dipimpin Letkol Untung, adalah gerakan kudeta yang akan merebut kekuasaan negara. Dalam pidatonya itu dua kali Jenderal Soeharto menyebut nama Pancasila. Kalimat penutupnya menyebutkan "Kita pasti menang karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa".³⁰⁾ Keadaan yang telah berbalik itu membuat pimpinan PKI dan pimpinan gerakan lainnya menjadi panik. Kepanikan itu sebenarnya telah diawali oleh kegusaran ketika pagi hari mereka menerima laporan, bahwa Jenderal Nasution lolos dari penculikan oleh karena itu kemudian pimpinan gerakan memerintahkan agar Jenderal Nasution dicari dan ditangkap hidup atau mati, namun tidak berhasil.³¹⁾ Pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman, selaku Pimpinan Pelaksana Gerakan 30 September serta pimpinan gerakan lainnya mengambil kesimpulan bahwa gerakan telah gagal dengan menggabungkannya pasukan-pasukannya ke Kostrad. Apalagi setelah ia mendengar laporan bahwa Kostrad dan RPKAD telah bergerak menuju Halim Perdana Kusumah. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Pimpinan Gerakan adalah memerintahkan penjagaan terhadap keselamatan D.N. Aidit selaku pimpinan tertinggi G.30.S/PKI agar dapat terus memimpin Partai dan gerakan. Bersama-sama dengan Mayor (U) Suyono,

Syam menemui D.N. Aidit untuk melaporkan kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh pimpinan pelaksana G.30.S. Akhirnya diputuskan bahwa D.N. Aidit akan segera berangkat ke Yogyakarta untuk meneruskan memimpin gerakan dari sana.³²⁾ Selanjutnya para pimpinan pelaksana gerakan menuju basis gerakan di Lubang Buaya, Pondok Gede, untuk membicarakan kelanjutan Gerakan 30 September. Pertemuan yang dihadiri oleh Syam, Brigjen Supardjo, Letkol Untung, Kolonel Latief dan Mayor (U) Suyono itu akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan gerakan karena mustahil akan dapat melanjutkan gerakan. Karena itu diputuskan semua pasukan dibubarkan, dan masing-masing meninggalkan Lubang Buaya untuk menyelamatkan diri.³³⁾ Demikianlah tekad untuk menyelamatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada hakekatnya telah dimenangkan sejak pukul 20.00 oleh putra-putra bangsa yang selalu memegang teguh Pancasila.

3. Bangkitnya kekuatan-kekuatan Orde baru

pemberontakan G.30.S/PKI yang dimulai di Jakarta itu kemudian meluas pula ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di Jawa Tengah yang merupakan daerah basis PKI. Namun sebagaimana di Jakarta gerakan-gerakan yang terjadi di Jawa Tengah itupun dengan cepat dapat digagalkan berkat adanya kerjasama yang baik antara ABRI dan rakyat. Dalam aksi pertama G.30S/PKI di Jawa Tengah telah jatuh dua orang perwira Angkatan Darat, yakni Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono. Gagalnya semua gerakan yang dilancarkan PKI itu, karena PKI menilai bahwa seluruh AURI dan sebagian Angkatan Darat telah dikuasainya sedang ALRI dan AKRI dapat diabaikan.

Berhasilnya ABRI di bawah konando Mayjen Soeharto menguasai Halim, tempat pusat G.30.S/PKI, membuktikan bahwa baik secara politis maupun militer gerakan G.30.S/PKI telah gagal. Karena itu operasi-operasi yang dijalankan di daerah-

daerah lebih ditujukan kepada bentuk operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Tindakan selanjutnya adalah tindakan penumpasan dan pembersihan terhadap sisa-sisa G.30.S/PKI.

Kegagalan total G.30.S/PKI pada langkah pertama itu menyebabkan pimpinan PKI dengan cepat mengambil langkah cuci tangan. Pimpinan PKI mengambil keputusan untuk berusaha menjaga eksistensi Partai; karena itu penyelesaian politik G.30.S diharapkan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dalam hubungan ini pada tanggal 5 Oktober 1965 dikeluarkan sebuah pernyataan CC PKI yang isi pokoknya ialah : PKI tidak campur tangan dalam G.30.S dan tidak tahu menahu tentang anggota-anggota PKI yang namanya tercantum dalam Dewan Revolusi, mendukung penyelesaian politik seperti yang digariskan oleh Presiden Soekarno. ³⁴⁾

Di dalam hal penyelesaian politik seperti isi pokok pernyataan itu, ternyata terdapat perbedaan yang mendasar antara Presiden Soekarno beserta beberapa Menteri Kabinet Dwikora seperti Dr. Subandrio dengan pimpinan ABRI di bawah Jenderal A.H. Nasution dan Jenderal Soeharto. Selama berada di Halim, Presiden ternyata tidak mengambil tindakan pencegahan setelah mendengar dan mengetahui pengumuman tentang "Dewan Revolusi" serta susunan personalianya itu. Demikian juga Presiden Soekarno membiarkan saja ketika Men/Pangau Laksamana Udara Omar Dhani mengeluarkan pengumuman yang mendukung G.30.S/PKI. ³⁵⁾ Bahkan isi amanatnya yang diucapkan pada tanggal 2 Oktober 1965 yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia meyeruhkan agar rakyat tinggal tetap tenang serta kepada semua menteri dan petugas-petugas negara lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti sedia kala. ³⁶⁾ Sebaliknya pimpinan Angkatan darat yang sejak awal mengetahui adanya gerakan penculikan terhadap para perwira tinggi AD, dan disusul dengan pengumuman-pengumuman dari pimpinan G.30.S melalui RRI telah menilai bahwa gerakan perebutan kekuasaan negara itu adalah gerakan PKI. Kesimpulan penilaian menjadi semakin jelas ketika para pimpinan gerakan seperti ex

Letkol Untung, ex. Kolonel Latif, Nyono dan lain-lain tertangkap. Dari dokumen-dokumen yang berhasil disita serta pengakuan-pengakuan para tokoh G.30.S itu dapat diketahui bahwa G.30.S digerakkan dan didalangi oleh PKI. Sesudah itu pimpinan Angkatan Darat berupaya agar Presiden Soekarno percaya bahwa PKI-lah yang menggerakkan dan mendalangi Gerakan. Selanjutnya para Jenderal Angkatan darat pada tanggal 3 Oktober 1965 meminta kepada Presiden Soekarno agar fitnah yang dilancarkan PKI terhadap pimpinan Angkatan Darat itu diperiksa.

Pada tanggal 6 Oktober 1965 Presiden Sukarno memimpin sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Pada sidang itu Presiden tidak tegas menyalahkan Gerakan 30 September yang dilancarkan PKI, namun selaku Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi ia menandakan bahwa mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontra revolusioner dari apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September". Kepada rakyat diingatkan agar tidak membesarkan peristiwa G.30.S itu sebab menurut Presiden kejadian itu hanya sekedar "een rimpeltje in de oceaan (suatu riak kecil pada permukaan sebuah samudra)".

Hasil sidang paripurna kabinet itu semakin menyingkap fakta bahwa PKI adalah dalang G.30.S. Rakyat yang selama ini diteror oleh PKI, semakin marah, yang kemudian tercetus dengan pembakaran gedung kantor pusat PKI di Jakarta. Rumah-rumah tokoh PKI dan kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat. Timbullah aksi corat-coret yang menuntut supaya pimpinan PKI diadili. Aksi-aksi tersebut juga menuntut pembubaran PKI serta pembersihan semua aparat atau lembaga pemerintah atau negara dari unsur-unsur G.30.S.³⁷⁾ Aksi-aksi yang dilakukan oleh Komando Aksi Pengganyangan Gerakan Kontra Revolusi (Kontrev) pada mulanya hanya timbul secara spontan dari masing-masing golongan kemudian berkembang lebih terorganisasi. Demikianlah pada tanggal 23 Oktober 1965 Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan Kontra Revolusi yang terdiri dari NU, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, PSII dan PNI/Osca-Usep, dileng-

kapi dengan ormas-ormas anti komunis seperti Muhammadiyah, Soksi dan lain-lain, berubah menjadi Front Pancasila. Front Pancasila itu mengadakan aksi-aksi secara gigih membantu ABRI dalam usaha memulihkan keamanan dan ketertiban dan sekaligus menumpas sisa-sisa G.30.S/PKI di Ibukota dan di seluruh Indonesia. ³⁸⁾ Lahirnya Front Pancasila nampaknya mengilhami para mahasiswa untuk menghimpun diri, dan pada tanggal 25 Oktober 1965 lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diprakarsai oleh Brigjen Sjarif Thayeb Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Lahirnya KAMI merupakan unsur yang penting bagi sejarah perjuangan melawan orde lama, karena KAMI kemudian berkembang menjadi pelopor pendobrak tata kehidupan lama ke arah tata kehidupan kenegaraan baru yang berlandaskan kepada kemurnian Pancasila dan UUD '45 yang kemudian dikenal dengan Orde Baru. Aksi-aksi perjuangan yang spontan itu selanjutnya merangsang berbagai golongan masyarakat untuk bersama-sama berjuang menegakkan tatanan kehidupan baru berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sehingga terbentuklah berbagai kesatuan aksi. Dalam hubungan ini lahirlah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), dan sebagainya. Kesatuan aksi-kesatuan aksi itu bersama dengan ABRI yang setia pada Pancasila dan yang mendapat dukungan rakyat merupakan kekuatan-kekuatan pendukung lahirnya Orde Baru.

Sampai akhir tahun 1965 seluruh kesatuan aksi, Front Pancasila bergerak meluas ke seluruh daerah melancarkan demonstrasi-demonstrasi serta tuntutan pembubaran PKI, dan secara serempak membantu ABRI dalam usaha menumpas setiap bentuk teror maupun pengacauan yang dilakukan oleh sisa-sisa G.30.S/PKI. Sementara itu baik di tingkat pemerintah Pusat maupun di tingkat daerah, terutama oleh para panglima daerah militer mulai dilakukan pembekuan terhadap partai politik dan

organisasi massa yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam G.30.S seperti PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, CGMI, Baperki, Lekra dan sebagainya. Di samping itu kemudian pula ada instruksi-instruksi untuk membersihkan departemen-departemen, lembaga-lembaga negara dan jawatan-jawatan dari unsur G.30.S. Media massa yang terlibat seperti *Harian Rakyat*, organ PKI dilarang,³⁹⁾ serta mereka yang terlibat dalam gerakan itu diamankan dan dikelompokkan sesuai dengan kadar keterlibatannya yaitu diklasifikasikan ke dalam golongan A, B dan C. Pembersihan terhadap sisa-sisa G.30.S/PKI tidak selalu berjalan lancar, sebab mereka sering juga mengadakan perlawanan dengan sengit. Akibatnya lalu timbul bentrokan antara rakyat dengan pengikut-pengikut G.30.S/PKI, terutama di Jawa Tengah (seperti Solo, Klaten, Boyolali), Jawa Timur (antara lain daerah Bayuwangi) dan Bali karena pengaruh PKI cukup kuat. Namun dalam laporan Panglima Kopkamtib pada bulan Desember 1965 dapat disimpulkan bahwa operasi penumpasan terhadap G.30.S/PKI telah selesai. Selanjutnya pemulihan keamanan dan ketertiban diserahkan kepada *Pepelrada* dalam rangka kegiatan membersihkan orpol dan ormas pendukung G.30.S di daerah-daerah. Sementara itu Presiden Sukarno di samping telah menerima saran-saran D.N. Aidit melalui surat rahasianya yang ditulis pada tanggal 6 Oktober 1965 mengenai penyelesaian politik yang diinginkannya, pada tanggal 10 bulan yang sama juga menerima surat dari Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution yang isinya antara lain mengenai saran-saran atau usul penyelesaian G.30.S/PKI. Jenderal Nasution menyarankan supaya segera diadakan sidang mahkamah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta pelaksanaan Penpres No. VII tahun 1959 terhadap partai-partai politik dan ormas yang terlibat.⁴⁰⁾

Untuk menerima saran penyelesaian peristiwa G.30.S itu, nampak bahwa Presiden Sukarno tidak dapat menolak gagasan-gagasan D.N. Aidit, dalam hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden Sukarno selanjutnya yang tidak memperhatikan atau mengabaikan tuntutan-tuntutan rakyat.

Demikianlah sementara aksi-aksi menuntut pembubaran PKI, Presiden Sukarno dalam rapat Panca Tunggal seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1965 kembali menegaskan bahwa Nasakom adalah perlu dan mutlak untuk revolusi Indonesia. (PKI adalah unsur Nasakom). ⁴¹⁾ Untuk mengalihkan sasaran utama tuntutan rakyat, yaitu pembubaran PKI, Presiden selalu mengingatkan kepada rakyat bahwa musuh utama bangsa Indonesia adalah Neo-kolonialisme (Nekolim) dan subversi asing. Selanjutnya Presiden yang merasa diperintah menjadi marah. Pada pertemuan dengan wakil-wakil partai politik PNI, NU, PSII, IPKI, Parkindo, Partai Katolik dan Partindo pada tanggal 27 Oktober 1965, ia mengancam bahwa partai-partai dan ormas-ormas yang menuntut pembubaran PKI akan ikut dibubarkan bersama PKI. Dalam pertemuan itu Presiden juga mengatakan bahwa "revolusi kita adalah revolusi kiri, kiri karena apa ? Pancasila *of zich zelf is alkiri*. Pancasila sendiri itu adalah kiri). Apalagi kalau kita memperhatikan dari Pancasila, maka dengan tegas dan jelas saya katakan bahwa revolusi kiri. Tetapi saya melihat sebagai epilog daripada kejadian 30 September itu, kalau kita tidak waspada revolusi ini akan bergeser ke kanan. Dan jikalau revolusi kita ini menggeser ke kanan, maka saya berkata, itulah malapetaka yang sebesar-besarnya, lebih besar daripada kejadian 30 September sendiri". Lebih lanjut banyak pernyataan-pernyataan Presiden Sukarno dalam usahanya mencari penyelesaian peristiwa G.30.S/PKI malah membuat suasana konflik yang meruncing di dalam masyarakat. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1965 Presiden mengatakan "Nasakom akan tetap hidup selagi saya hidup". Selanjutnya di depan siswa-siswa Lemhanas pada tanggal 11 Desember 1965 Presiden Sukarno mengatakan bahwa MPRS pada sidang gabungan pada tanggal 6-10 Desember 1965, dalam usaha mencari jalan penyelesaian peristiwa G.30.S secepatnya, telah mengambil keputusan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian politik kepada Presiden/PBR/Mandataris MPRS tanpa bersyarat. ⁴²⁾ Dalam keadaan politik yang tidak menentu, krisis ekonomi menjadi semakin

parah. Kesejahteraan rakyat semakin merosot, karena laju inflasi sampai mencapai 650 persen. Kebijakan Ekonomi pemerintah yang dimumkan pada tanggal 13 Desember 1965 ternyata menambah buruknya nasib rakyat. Isi pokok kebijaksanaan itu adalah tentang devaluasi nilai rupiah, yaitu dari nilai Rp. 1.000,— uang lama turun menjadi Rp. 1,— uang baru. Keputusan Pemerintah ini disusul dengan Penpres No. 27 berikut ketetapan-ketetapan tambahna kenaikan tarif dan jasa karena pengaruh devaluasi rupiah. Ketegangan mencapai puncaknya dengan dinaikkannya harga minyak bumi dan bahan bakar pada tanggal 3 Januari 1966.

Keresahan sosial dan konflik politik yang melanda seluruh masyarakat belum menyakinkan pemerintah bahwa perlu segera diambil tindakan-tindakan memenuhi tuntutan rakyat banyak. Pemerintah kemudian membentuk dua panitia adhoc. Yang pertama meneliti keadaan ekonomi dan keuangan, terutama yang menyangkut pengaruh kenaikan harga barang-barang dan tarif jasa. Yang kedua diberi nama Fact-finding Commission (FFC) KOTI, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dr. Sumarno Sosroatmodjo, yang anggotanya terdiri dari Men/Pangak Inspektur Jenderal Sutjipto Judodihardjo, Menteri Penerangan Achmadi, Menteri Agraria Hermanses, Menteri Negara Oei Tjoe Tat, Ketua Gabungan V/KOTI Brigjen Sunarso, Kilian Sihotang (Parkindo) Chalid Mawardi (NU) dan Zaini Mansur (PNI). Adapun tugas panitia ini adalah menghimpun segala fakta dan keterangan serta bukti-bukti tentang peristiwa G.30.S dan epilognya. Hasil panitia pertama tidak ada artinya karena derasnya laju inflasi. Hasil panitia kedua berupa data-data yang diperlukan untuk penyelesaian politik sudah disampaikan kepada Presiden, namun penyelesaian peristiwa G.30.S masih tetap saja tidak dilakukan. Padahal kesimpulan yang diambil oleh komisi adalah bahwa keinginan keras rakyat agar Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.⁴³⁾ Menyadari akan memuncaknya kegelisahan sosial maka Badan Koordinasi Kesatuan Aksi dan Front Pancasila menandatangani

sebuah naskah deklarasi mendukung Pancasila. Pokok isinya adalah persatuan antara Dwitunggal yang terdiri dari rakyat dan ABRI dalam mengamalkan ideologi Pancasila secara murni, serta menolak usaha pembelaan G.30.S/PKI dalam bentuk apapun.⁴⁴⁾ Untuk menolong penderitaan Rakyat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) meminta agar keputusan menaikkan harga barang ditinjau kembali. Namun pernyataan ini ternyata tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

Ketidakpuasan rakyat akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan pelajar. Dimotori oleh KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi yang dipelopori oleh Mahasiswa Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966. Aksi-aksi mereka dilancarkan di sepanjang jalan di kota Jakarta dan juga mendatangi pimpinan DPR-GR agar tuntutan mereka disampaikan kepada Presiden Sukarno. Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada Pemerintah yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni :

- Bubarkan PKI
- Turunkan harga/perbaiki ekonomi
- Retool Kabinet Dwikora.⁴⁵⁾

Sementara itu mahasiswa dan pemuda di Bandung mencetuskan Petisi Ampera yang ditujukan langsung kepada Presiden dan juga kepada DPR-GR. Petisi itu berisi tuntutan untuk pembubaran PKI dan penanggulangan ekonomi dengan penurunan harga.⁴⁶⁾ Aksi demonstrasi yang semula dilakukan di Jakarta dan Bandung menjalar ke kota-kota lain di Indonesia, dan ternyata aksi-demonstrasi itu mendapat dukungan dari berbagai kekuatan sosial lainnya maupun Front Pancasila serta rakyat umum. Reaksi pemerintah terhadap aksi-aksi Tritura itu adalah mengundang KAMI untuk hadir dalam sidang paripurna Kabinet Ampera di Bogor pada tanggal 15 Januari 1966. Dalam sidang itu Presiden menuduh aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh Nekolim dan khususnya CIA (Central Intelligence Agency) Amerika. Presiden

mengatakan bahwa "politik solution" akan diberikan, dan kepada yang sanggup menurunkan harga akan diangkat menjadi Menteri Urusan Harga. (Tantangan dari Presiden Sukarno mengenai siapa yang sanggup menurunkan harga itu disambut dengan berani oleh beberapa orang sipil walaupun mereka tahu apabila gagal akan ditembak mati.⁴⁷⁾ Akhirnya Presiden Sukarno memberi komando kepada seluruh rakyat untuk membentuk "Barisan Sukarno" untuk mempertahankan kedudukannya terhadap apa yang dirasakannya sebagai usaha mendongkelnya.⁴⁸⁾ Komando Presiden tersebut dimanfaatkan oleh golongan yang terdesak oleh aksi-aksi Tritura, terutama Dr. Subandrio dan kawan-kawan maupun PKI. Demikianlah pada tanggal 16 Januari 1966 Subandrio menyatakan bahwa "Barisan Sukarno" bertujuan untuk mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Rakyat masih mengakui kepemimpinan Presiden Sukarno, maka berbagai pihak menyatakan dukungan Presiden. Pada waktu itu kelihatan bahwa semua pihak berlomba-lomba mendukung komando itu.

Dalam pada itu ABRI sebagai kekuatan sosial politik mengeluarkan pernyataan bahwa ABRI tetap taat kepada PBR/Pangti ABRI dan menyerukan agar memelihara kekompakan sesama ABRI serta kekompakan antara rakyat dan ABRI. Namun pimpinan ABRI menyatakan bahwa seluruh rakyat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah Barisan Sukarno, sehingga pembentukan secara fisik barisan itu tidak perlu. Oleh karena itu larangan dari Pempelrada Jawa Barat yang memandang pembentukan barisan itu secara fisik akan menimbulkan perpecahan, diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Komando Antar daerah Sumatra. KAMI Pusat yang berpendapat sama, mendukung larangan itu. Kegagalan pada langkah pertama dari usaha pembentukan "Barisan Sokarno", berarti juga kegagalan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari penyelesaian politik yang sangat ditunggu-tunggu. Presiden Sukarno yang tidak puas atas sambutan terhadap komandonya, kembali mengulangi seruannya pada tanggal 20 Januari 1966 yang

intisariannya adalah agar para pendukungnya menyusun kekuatan. Demikianlah seruan Presiden itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan Orde Lama yang menghasut massa PNI/Front Marhaenis Ali-Surachman (PNI-Asu) untuk membalas aksi-aksi KAMI dan lain dengan perbuatan teror. Pertentangan antara kekuatan Orde Baru dengan Orde Lama tidak hanya terbatas pada perang mulut (pertanyaan dan penyebaran pamflet) tetapi juga sudah meningkat kepada perbenturan fisik. Aksi-aksi demonstrasi hendak dipatahkan dengan menggunakan Resimen Cakrabirawa (Pengawal Presiden). Badan Pusat Intelijen (BPI) dan orang-orang kriminil, hanya dengan bantuan ABRI dan Front Pancasila, perjuangan Tritura dapat diteruskan.⁴⁹⁾ Untuk memperkuat kedudukan pemerintahan, presiden Sukarno mengadakan reshuffle kabinet, yang hasilnya disebut "Kabinet Dwikora yang disempurnakan". Tindakan Presiden itu mengundang amarah para mahasiswa terutama dengan ucapan bahwa reshuffle itu bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi, melainkan karena meningkatnya perjuangan revolusi. Apalagi susunan Kabinet itu tidak memasukkan beberapa tokoh seperti Menko Hankam/Kasab Jenderal A.H. Nasution, yang gigih menentang G.30.S/PKI justru disingkirkan. Namun sebaliknya orang-orang yang diragukan itikad baiknya, dan bahkan terlibat G.30.S/PKI seperti Subandrio, Nyoto, Oei Tjoe Tat SH, serta Ir. Surachman dan lain-lain diangkat sebagai menteri. Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini oleh para mahasiswa disebut "Kabinet Gestapu" atau Kabinet 100 menteri karena memang anggotanya lebih dari 100 orang.⁵⁰⁾ Para mahasiswa menolak kabinet yang disempurnakan itu. Oleh karena Kabinet Dwikora yang disempurnakan itu sangat mengecewakan aspirasi rakyat, maka demonstrasi-demonstrasi dilanjutkan kembali. Demikianlah pada tanggal 24 Februari 1966, pada waktu pelantikan Menteri Kabinet yang disempurnakan, KAMI dengan eksponen-eksponen Angkatan 66 lainnya pada pagi hari bergerak turun ke jalan melakukan aksi secara besar-besaran untuk mengempeskan ban-ban mobil. Keadaan lalu lintas menuju Istana tempat pelantikan

kebinet menjadi lumpuh sama sekali, sehingga ada Menteri yang datang ke Istana dengan menggunakan sepeda atau ada yang diambil dengan helikopter.⁵¹⁾ Bentrokan fisik terjadi di beberapa tempat, dan dalam bentrokan di depan Istana, seorang demonstran, Arief Rachman Hakim, Mahasiswa Universitas Indonesia gugur karena ditembak oleh Resimen Cakrabirawa, Pengawal Presiden. Peristiwa berdarah itu menambah parahnya krisis nasional. Akibatnya dari aksi itu pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yakni Presiden Sukarno sendiri, KAMI dibubarkan. Di samping itu dikeluarkan pula surat perintah penangkapan atas tokoh-tokoh KAMI. Demikianlah tanggal 24 Februari itu merupakan puncak krisis daripada perjuangan KAMI dalam aksi-aksi Tritura.

Sementara itu mahasiswa-mahasiswa Bandung yang tidak puas, memperotes keputusan itu dengan mengeluarkan "Ikrar Keadilan dan Kebenaran" serta mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Sementara itu pula Dr. Subandrio pada peringatan Sapta Warsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), ormas PNI-Asu pada tanggal 28 Februari 1966 menghasut massa Marhaen untuk melakukan teror terhadap lawan politiknya.⁵²⁾ Keadaan menjadi bertambah tidak aman, sehingga di Jakarta jam malam diperpanjang. Tindakan selanjutnya untuk mematahkan perjuangan KAMI adalah dengan menutup Universitas Indonesia pada tanggal 3 Maret 1966, dan melarang para mahasiswa berkumpul lebih dari lima orang.⁵³⁾ Sebagai ganti KAMI, muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang melanjutkan aksi-aksi Tritura. Massa demonstran mengobrak-abrik Departemen Luar Negeri sebagai tempat kedudukan Menteri Subandrio dan Kantor berita RRC Hsin Hua di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1966 sehingga menimbulkan kemarahan Presiden Sukarno. Presiden mengeluarkan Perintah Harian yang ditujukan kepada Slagorde ABRI, parpol-parpol dan ormas-ormasnya, Golkar dan seluruh rakyat "yang progresif revolusioner". Isi perintah harian itu antara lain

adalah seruan agar mempertinggi kewaspadaan terhadap usaha untuk membelokkan jalannya revolusi kita "kekanan", dan supaya siap sedia menghancurkan setiap usaha yang merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi serta memperhebat penganyangan terhadap Nekolim dan "Proyek British Malaysia" serta mensukseskan Conference of New Emerging Forces (Conefo) yang akan datang.⁵⁴⁾ Dalam pada itu isi Perintah Presiden Sukarno agar Pepelrada meningkatkan pelaksanaan pembubaran terhadap KAMI mengkhawatirkan golongan Pancasila. Sehubungan dengan itu pada tanggal 8 Maret 1966 Front Pancasila mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta kepada pemerintah agar pembubaran KAMI ditinjau kembali. Presiden yang merasa ditentang perintahnya, menjadi marah sekali atas permintaan itu. Reaksi lebih lanjut dari Presiden adalah memanggil beberapa orang Menteri dan wakil-wakil partai ormas. Front Pancasila diwakili oleh Menteri Urusan Penghubung dengan Alim Ulama Marzuki Jatim dari Muhammadiyah.⁵⁵⁾ Presiden menyatakan kemarahannya terhadap Front Pancasila dan meminta agar Front Pancasila beserta PNI (Ali-Surachman) dan Partindo berkumpul di ruang DPA pada tanggal 10 Maret 1966. Dalam rangka menghadapi pertemuan tanggal 10 Maret 1966 itu di rumah Ketua Front Pancasila Subchan Z.E. diadakan pertemuan di antara partai dan ormas yang tergabung di dalam Front Pancasila. Kesimpulan dari keputusan-keputusan pertemuan itu adalah kesepakatan bersama untuk bersikap kompak dalam menghadapi Orde Lama, dan yang akan menjadi juru bicara adalah K.H.A. Sjaichu dan Marzuki Jatim.

Pertemuan yang diadakan di Istana Merdeka itu dihadiri oleh wakil-wakil NU, PSII, Perti, Muhammadiyah, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, PNI-Asu dan Partindo; sedangkan Presiden Sukarno didampingi oleh ketiga wakil perdana menteri yakni Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, Dr. Chaerul Saleh, Menteri Dalam Negeri Sumarno, Menteri Penerangan Mayor Jenderal Achmadi dan Dubes RI untuk Kuba AM. Hanafi. Pertemuan

yang berlangsung dalam suasana panas itu pembicaraannya berkisar pada dua pokok pemikiran yang saling bertentangan. Pihak Orde Lama (Orla) menghendaki agar partai politik dan organisasi massa mengutuk aksi-aksi Tritura; sedangkan pihak Front Pancasila (Orde Baru) menghendaki agar PKI yang merupakan sumber krisis politik dibubarkan.⁵⁶⁾ Karena pendiriannya itulah maka Front Pancasila tidak bersedia mengutuk demonstrasi kecuali hanya mengingatkan agar tidak ditunggangi oleh pihak ketiga. Hasil kompromi yang dicapai itu tidak memuaskan kedua pihak, terutama Front Pancasila. Untuk menghindari salah pengertian tentang hasil kompromi parpol-parpol dan ormas-ormas tanggal 10 Maret itu, maka Front Pancasila mengeluarkan penjelasan tersendiri untuk intern Parpol dan ormas pada tanggal 11 Maret 1966.⁵⁷⁾

4. Dialog Sukarno - Soeharto

Setelah meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI antara Presiden Sukarno dan Mayor Jenderal Soeharto telah mengadakan dialog mengenai Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI itu. Dialog itu dimulai sejak tanggal 2 Oktober 1965 ketika Mayor Jenderal Soeharto dipanggil menghadap ke Istana Bogor. Dialog juga terjadi pada pertemuan para Panglima Angkatan pada sidang-sidang Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Di samping itu juga seringkali dialog "empat mata". Dialog tidak terjadi hanya satu kali, tetapi berkali-kali dan dengan terus terang. Di dalam dialog memang terjadi perbedaan pendapat antara Presiden Sukarno dengan Mayor Jenderal Soeharto dalam menilai keadaan dan cara atau tindakan mengatasi keadaan. Sekalipun keduanya ada perbedaan pendapat, namun Jenderal Soeharto menyadari bahwa Bung Karno adalah atasan. Panglima Tertinggi ABRI. Dalam wawancaranya dengan Nugroho Notosusanto beliau menyatakan :

"Saya selalu menyadari bahwa Bung Karno adalah atasan saya sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dan kedua, saya menem-

patkan diri sebagai anak yang lebih muda terhadap orang tua. Tetapi saya tidak melepaskan diri daripada jiwa dan semangat saya yaitu sebagai pejuang, sekalipun kepada Bung Karno saya mengakui bahwa beliau adalah pejuang yang besar.⁵⁸⁾ Presiden Sukarno menilai bahwa G.30.S adalah karena keblingernya pemimpin PKI dan hanya sebagai "riak kecil di dalam samodra". Berdasarkan persepsi demikian maka Presiden tidak pernah tegas di dalam mengatasi keadaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965 beliau hanya memerintahkan agar semua pasukan tidak bergerak. Mayor Jenderal Soeharto menilai bahwa Gerakan 30 September adalah pemberontakan yang (pada waktu itu disebut dengan istilah kontra revolusi) yang didalangi oleh PKI. Berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Saptamarga Mayor Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keadaan atas inisiatif beliau sendiri selaku pejuang bangsa. Tindakan Mayor Jenderal Soeharto ternyata di kemudian hari menghindarkan rakyat Bangsa dan Negara dari malapetaka penindasan komunis.⁵⁹⁾ Mengenai korban para Jenderal pimpinan TNI-AD akibat penculikan, Presiden Sukarno berpendapat bahwa dalam perjuangan selalu meminta korban, bahkan para korban itu dianggap sebagai "riak kecil di dalam samodra". Mayor Jenderal Soeharto menyatakan bahwa bagaimanapun perjuangan itu meminta korban, akan tetapi korban daripada Jenderal-jenderal tidak direlakan, sebab mereka bukan menjadi korban karena perjuangan, tetapi korban daripada maksud yang akan membahayakan Pancasila, yang didalangi oleh PKI. Selanjutnya mengenai penilaian terhadap PKI. Menurut Presiden Sukarno PKI adalah kekuatan yang harus dihimpun. PKI harus dijadikan PKI Indonesia, PKI Pancasila. Ketika Mayor Jenderal Soeharto menanyakan apakah mungkin PKI Pancasila akan terwujud dilihat dari segi doktrin dan ideologi. Presiden Sukarno menjawab : "Kamu seorang prajurit kerjakan apa yang diperintahkan. Mengenai perjuangan serahkan kepada saya." Kalau ditinjau lebih lanjut, karena perbedaan penilaian menyebabkan perbedaan dalam cara mengatasinya. Mayor Jenderal Soeharto

menilai bahwa PKI benar-benar melakukan kudeta yang membayakan Pancasila. Jadi kalau tidak diambil tindakan berarti kita akan memberi kesempatan lagi, dengan sendirinya kita akan memberi kesempatan lagi, dengan sendirinya pada suatu waktu nanti mereka tentu akan mengulangi lagi. Oleh karena itu pendapat pokok Mayor Jenderal Soeharto adalah *jangan memberi kesempatan lagi pada PKI*.

Presiden Sukarno kemudian menyatakan bahwa gerakan PKI akan sangat berbahaya kalau tidak dilegalisir. Karena akan melahirkan gerakan-gerakan illegal dan akan lebih berbahaya. Sebaliknya Mayor Jenderal Soeharto mengemukakan bahwa bukan dengan cara yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam menghadapi pengaruh PKI. Caranya adalah apakah kita mampu atau tidak mengajak rakyat. Rakyat sudah benar-benar sadar akan berbahayanya komunis. Oleh karena itu harus dipisahkan rakyat yang anti komunis dengan yang pro komunis. Jika demikian masalahnya akan dapat diatasi. Sekalipun komunis mengadakan gerakan bawah tanah, apabila kita bisa membawa rakyat ke arah kekuatan untuk menghadapi komunis, maka komunis akan hancur.

Masih dalam cara mengatasi keadaan. Presiden Sukarno menyatakan cara yang paling mudah adalah melaksanakan perintahnya dengan memadamkan gerakan-mahasiswa. Agar gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang kebijaksanaan Presiden dipadamkan. Mayor Jenderal Soeharto menyatakan bahwa gerakan mahasiswa dan rakyat tidak semata-mata menentang Bung Karno, akan tetapi justru ingin mengamankan dan mendukung Bung Karno untuk menyelamatkan perjuangan, kalau Bung Karno dapat menyanggupi maksud keinginan rakyat yang meyakini bahwa PKI merupakan bahaya. Jadi kalau Mayor Jenderal Soeharto diperintahkan untuk menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat itu, sama halnya dengan menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang PKI. Hal ini berarti menghancurkan kekuatan yang harus mengamankan Pancasila. Masalahnya akan terbalik.

Presiden Sukarno menilai bahwa di belakang gerakan rakyat adalah imperialis Amerika. Mayor Jenderal Suharto meyakinkan bahwa penilaian itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa rakyat telah menyadari akan bahaya komunis. Rakyat menaruh kepercayaan yang besar kepada Bung Karno untuk bertindak tegas seperti pada tahun 1948 menghadapi pemberontakan PKI. Mayor Jenderal Soeharto meminta agar Bung Karno mengajak rakyat untuk memilih Sukarno atau PKI, pasti semua akan memilih Bung Karno. Dalam hal ini perlu dibarengi dengan tindakan tegas terhadap PKI.

Dalam dialog selanjutnya mengenai pembubaran PKI, Presiden Sukarno menyatakan bahwa ia (Sukarno) "bukan lagi hanya pemimpin rakyat Indonesia tetapi telah menjadi dunia. Konsep dalam rangka membawa kekuatan Nasakom kepada dunia akan saya demonstrasikan. Ini sudah saya jual ke luar dan diterima oleh negara-negara non blok. Dus tidak bisa saya bubarkan PKI". Mayor Jenderal Soeharto menyampaikan jawabannya bahwa kepentingan nasional perlu didahulukan, daripada kemercusuaran ke luar negeri. Nyatanya maksud baik Bung Karno untuk menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil bahkan sebaliknya. PKI meng*exploiter* Bung Karno untuk melaksanakan programnya, yaitu menguasai keadaan dan membahayakan Pancasila, karena jelas yang dituju adalah negara komunis. Oleh karena itu sangat pantas rakyat mempertahankan Pancasila. Akan tetapi apakah pantas perjuangan kita ini dikorbankan hanya untuk kepentingan komunis saja, khususnya PKI? Maka lebih baik mementingkan diri sendiri daripada kepentingan internasional.

Di dalam pelbagai dialog yang dilakukan ternyata Mayor Jenderal Soeharto tetap teguh berpendirian bahwa dalam cara mengatasi keadaan adalah tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD '45 dan PKI harus dibubarkan. Akhirnya Mayor Jenderal Soeharto mengajukan satu usul konkrit, yaitu ia bersedia untuk bertindak sebagai *bumper* bagi Presiden untuk mengambil tindakan itu, sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan

dan Ketertiban Mayor Jenderal Soeharto akan membubarkan PKI. Presiden tinggal menyatakan secara umum menyetujui tindakan Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Jadi keluar negeri Mayor Jenderal Soeharto yang menyelamatkan nama Bung Karno. Bung Karno tidak perlu bertindak. Demikianlah dialog-dialog antara Presiden Sukarno dengan Jenderal Soeharto yang melatar belakangi dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 itu.

CATATAN BAB I

- ¹⁾ Georgi Dimitrov, adalah seorang Sekretaris Jenderal Comintern 1943-1945. Ia menyatakan bahwa untuk menghadapi Fasisme, kaum komunis harus membentuk Front Persatuan dan kesatuan aksi dengan semua kekuatan di semua negara. Pernyataan ini kemudian dijadikan doktrin komunis internasional. Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism : a History*, New York, Prederick A Praeger, 1963, hal. 29
- ²⁾ PKI secara resmi baru muncul kepermukaan pada 7 November 1945 tetapi Muhammad Yusuf tetap mengatakan yang resmi adalah yang ia bentuk itu. Lihat George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York, Cornell Univ. Press, 1952, hal 158-159
- ³⁾ Brackman, *op.cit.*, hal. 55
- ⁴⁾ Benedict ROG Anderson, *Java in a Time of Revolution*, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1972, hal. 344-345
- ⁵⁾ Brackman, *op.cit.*, hal. 57

- 6) Andrei Zhdanov, berpidato pada pembentukan Cominform di Warsawa 22 September 1947 yang kemudian dijadikan garis perjuangan komunis : Kekuatan komunis harus meninggalkan front populer, karena Perang Dunia Kedua mengakibatkan krisis sistem kolonial yang terlihat pada pergerakan pembebasan nasional dan kemerdekaan dari kolonial. Dalam pembagian dua kubu, maka Indonesia ditempatkannya pada blok Soviet. Brackman, *op.cit*, hal. 64-65
- 7) Kahin, *ibid*, hal. 257
- 8) Kahin, *ibid*, hal. 258
- 9) Mohammad Hatta, *Mendayung antara Dua Karang*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1976, hal. 48
- 10) Brackman, Arnold, C, *Communis Collapse in Indonesia*, 1979, hal.
- 11) Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hal. 119-120
- 12) Brackman, *Indonesia Communism*, hal. 155
- 13) Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1962, 233 dan 237
- 14) Brackman, *Indonesian Communism*, hal. 155 dan Feith, hal. 339.
- 15) Daniel S Lev, *The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics : 1957-1959*, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1966, hal 1
- 16) Brackman, *Indonesian Communism*, hal. 239-240
- 17) Nugroho Notosusanto, editor, *Tercapainya Konsensus Nasional*, 1966-1969, Jakarta, Balai Pustaka, 1985, hal 3-5
- 18) Ichlasul Amal, "Hubungan Pusat-Daerah, Kasus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan; *Prisma*, No. 12. Desember 1985. Lebih lanjut lihat. Herbert Feith, "Presiden Soekarno, The Army and The Communists : The Triangle Changes", *Asian Survey*, August, 1964, hal. 157-158

- 19) Brackman, *Communist Collapse in Indonesia*, hal.. (?)
- 20) Tentang keresahan petani menjelang G.30.S/PKI 1965, lihat *Laporan Mengenai Keresahan Pedesaan Pada Tahun 1960-an*, oleh Pusat Penelitian Studi Pedesaan dan Kawasan, Univ. Gajah Mada, 1982.
- 21) Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hal. 25
- 22) *G.30.S di hadapan Mahmilub di Djakarta (Perkara Untung)*, Pusat Pendidikan Kehakiman AD, 1966, hal. 4-9; 40 Hari Kegagalan G.30.S. hal. 47-48.
- 23) Nugroho Notosusanto Ed). "Menegakkan Orde Baru"; *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, 1985, hal. 114
- 24) Berkas Perkara Syam Kamarusaman, hal. 0028
- 25) *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/ PKI)*, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jakarta, 1978, hal. 141
- 26) *Amanat-amanat Penting di saat-saat Penghantjuran "GESTAPU"*, Direktorat Penerangan Stap Angkatan Bersendjata, hal. 8-9
- 27) Soetopo Soetanto, "Biro Khusus Partai Komunis Indonesia", *PERSEPSI*, No. 3, Th. 1, 1979, hal. 135.
- 28) *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/ PKI)*, hal. 144
- 29) *Ibid*, hal. 145
- 30) *Amanat-amanat Penting disaat-saat Penghancuran "GESTAPU"*, hal. 11-12
- 31) Keterangan Waluyo, *Berkas Perkara Mulyono bin Ngali*, hal. 0034; Keterangan Syam Kamaruzaman, *ibid*, hal. 0502; Keterangan Ex. Letkol Untung, *Berkas Perkara Syam Kamaruzaman*, hal. 0620-0621
- 32) *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/ PKI)*, hal. 124-125

- 33) *Ibid*, hal. 125
- 34) *Ibid*, hal. 191
- 35) *Amanat-amanat Penting disaat-saat Penghancuran "GES-TAPU"*, hal. 14.
- 36) *Ibid.*, hal. 8-9
- 37) *Angkatan Bersendjata*, tanggal 5-10-1965, Puspen AD, *Fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September*, PN. Balai Pustaka, 1965, hal..... (?)
- 38) *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/ PKI)* hal. 229-230
- 39) *Angkatan Bersenjata*, tanggal 7-10-1965
- 40) A.H. Nasution, *Menegakkan keadilan dan kebenaran I*, Penerbit, Seruling Masa, 1967, hal. 83-84
- 41) *Komando Operasi Tertinggi, Rangkaian Pidato dan Pernyataan-pernyataan Resmi di sekitar Peristiwa-peristiwa Gerakan 30 September*, PN. Balai Pustaka, 1965
- 42) *Berita Yudha*, tanggal 13-12-1965
- 43) Laporan tentang hasil Fact Finding Commission KOTI.
- 44) *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/ PKI)* hal. 230
- 45) *Berita Yudha*, 11 Januari 1966
- 46) *Berita Yudha*, 13 Januari 1966
- 47) *Berita Yudha*, 19 Januari 1966
- 48) *Pidato Presiden Sukarno di depan Sidang Kabinet Dwikora* tanggal 15 Januari 1966
- 49) Soe Hok Gie, *Catatan seorang demonstran* Jaket, LP3ES, 1983, hal. 187-188. Christianto Wibisono, *Aksi-aksi Tritura Kisah sebuah Partnership 10 Januari-11 Maret 1966*, Dep. Pertahanan-Keamanan, hal. 46
- 50) Christianto Wibisono, *Ibid.*, hal 64
- 51) *Angkatan Bersenjata*, 26-2-1966
- 52) *Pidato Waperdam Dr. Subandrio pada Sapta Warsa GSNI*, Jakarta, 1967, hal 27

- ⁵³⁾ Yozar Anwar, *Angkatan 66* Penerbit Sinar Harapan, 1981, hal. 178
- ⁵⁴⁾ *Angkatan Bersendjata*, 9 Maret 1966
- ⁵⁵⁾ Riwayat Singkat Surat Perintah 11 Maret 1966, Pusat Sejarah ABRI, hal. 29
- ⁵⁶⁾ Riwayat Singkat Surat Perintah 11 Maret 1966, Pusat Sejarah ABRI, hal. 31
- ⁵⁷⁾ *Angkatan Bersendjata*, 12 Maret 1966
- ⁵⁸⁾ Keterangan Presiden Soeharto tentang SP 11 Maret (dokumen).
- ⁵⁹⁾ Nugroho Notosusanto, Surat Perintah 11 Maret 1966 (naskah) bab III.

BAB II

LAHIRNYA SURAT PERINTAH 11 MARET

1. Sidang Kabinet yang gagal

Koran-koran ibukota edisi pagi tanggal 11 Maret 1966 memuat pernyataan "Kebulatan Tekad" partai-partai politik dan organisasi massa, ¹⁾ tentang sikap mereka terhadap aksi-aksi mahasiswa. Isi pokok pernyataan yang ditandatangani tanggal 10 Maret 1966 itu ialah "tidak membenarkan cara-cara yang dipergunakan para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang akibatnya langsung atau tidak langsung membahayakan revolusi Indonesia dan merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno".

Hal ini berarti bahwa partai-partai politik mengecam terhadap demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan mahasiswa dan pelajar. Selakipun beberapa orang tokoh KAMI mengetahui bahwa pernyataan itu dikeluarkan di bawah tekanan dan ancaman Presiden Sukarno setelah diskusi enam jam yang cukup panas dan penuh intimidasi, ²⁾ namun hal itu merupakan pukulan terbuka kedua yang mereka terima dalam waktu hanya lima belas hari.

Pukulan terbuka pertama mereka terima tanggal 25 Februari 1966 ketika pemerintah membubarkan KAMI.

Akan tetapi kecaman partai-partai politik itu tidak berpengaruh terhadap jadwal kegiatan mahasiswa dan pelajar yang telah mereka susun untuk tanggal 11 Maret 1966 itu, Seperti hari-hari sebelumnya, khususnya sejak tanggal 10 Januari 1966, mereka turun lagi ke jalan, memblokade jalan-jalan tertentu dan melancarkan, aksi pengempisan ban-ban mobil baik milik pribadi maupun milik pemerintah atau perusahaan swasta yang mereka temui di jalan-jalan. Jalan poros utama Ancol – Jatinegara dan Kebayoran Baru – Kota, macet total. Kemacetan juga melanda jalan-jalan di kiri dan kanan poros utama itu. Kendaraan-kendaraan angkutan umum tidak nampak beroperasi di jalan-jalan. Banyak pegawai terpaksa tinggal di rumah karena tidak ada kendaraan yang akan membawa mereka ke kantor.

Di Jalan-jalan utama seperti jalan Cikini, Diponegoro, Hayamwuruk, dan Gajahmada, truk-truk dan oplet malang melintang. Tampak puluhan mahasiswa dan pelajar menyanyi atau meneriakkan yel-yel. Di tempat lain kelihatan beberapa orang anak muda menarik pentil ban mobil. Pemilik kendaraan tak bereaksi membantah, malahan tersenyum seolah-olah merelakan apa yang dilakukan oleh anak-anak itu.

Daerah antara jembatan jalan Kimia sampai depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) di jalan Diponegoro, depan Rumah Sakit Umum Pusat sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merupakan daerah yang ada di bawah "kekuasaan" mahasiswa dan pelajar. Kendaraan dilarang memasuki daerah ini. Di mulut jalan Diponegoro (perempatan jalan Diponegoro, jalan Salemba) anak-anak muda menggandengkan tangan membentuk semacam pagar.

Di Kampus Universitas Indonesia Salemba, terutama halaman depan Fakultas Kedokteran yang sebelumnya merupakan pusat kegiatan KAMI, dijaga seluruhnya oleh satuan-satuan ABRI, khususnya Angkatan Darat. Mereka menempatkan

tenda-tenda di pekarangan depan. Tenda-tenda serupa terdapat pula di halaman Fakultas Hukum, di sebelah kiri Fakultas Kedokteran. Mahasiswa hampir-hampir tidak kelihatan di daerah ini.³⁾ Mereka sudah memindahkan kegiatan ke tempat-tempat lain.

Jalan antara Menteng Prapatan dan Gambir ditutup untuk umum. Daerah ini dijaga ketat oleh satuan-satuan ABRI. Jalan Merdeka Timur tampak sepi. Orang-orang yang diizinkan melalui jalan ini hanyalah mereka yang berkantor di sekitarnya. Satuan-satuan Cakrabirawa, dalam keadaan siap tempur, melakukan pengawalan yang ketat di sekitar Istana. Berhadap-hadapan dengan mereka berdiri massa rakyat yang terutama terdiri atas para mahasiswa dan pelajar.

Pada hari itu, seperti juga pada hari-hari sebelumnya, dua kubu sedang berhadap-hadapan. Kubu pertama adalah kubu istana yang antara lain menampakkan dirinya dalam bentuk pasukan Cakrabirawa. Kubu kedua ialah kubu mahasiswa yang didukung, walaupun tidak secara terang-terangan, oleh kelompok-kelompok ABRI tertentu. Kubu yang pertama ingin mempertahankan orde yang sedang berkuasa, sedang kubu yang kedua menuntut agar pemerintah mengadakan perubahan-perubahan secara mendasar dalam tatanan pemerintahan, politik dan ekonomi. Seperti halnya pada tanggal 24 Februari 1966, ajang konfrontasi antara kedua kubu ini terletak di daerah sekitar istana. Namun, berbeda dengan demonstrasi tanggal 24 Februari yang dimaksudkan untuk menggagalkan pelantikan menteri-menteri Kabinet Dwikora (yang disempurnakan), kehadiran mahasiswa dan pelajar di sekitar istana tanggal 11 Maret itu bertujuan untuk menggagalkan sidang kabinet.

Seperti sudah dijadwalkan, pada tanggal 11 Maret 1966 Kabinet Dwikora akan bersidang di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Karena sudah diperkirakan bahwa mahasiswa dan pelajar akan turun lagi ke jalan, pembantu-pembantu Presiden meminta kepada para menteri agar mereka sudah hadir di istana

sebelum pukul 06.00 pagi supaya tidak terhalang oleh kemacetan lalu-lintas. Marzuki Yatim, Menteri Urusan Penghubung Pemerintah dengan Alim-ulama, sudah tiba di istana pukul 05.00 pagi. ⁴⁾ Beberapa orang menteri datang ke istana dengan mengayuh sepeda. Menteri-menteri yang bertempat tinggal di daerah Kebayoran Baru dikumpulkan di Blok M dan dari sini diangkut dengan helikopter ke istana. ⁵⁾

pagi itu Brigjen Amir Machmud selaku Panglima Daerah Militer V/Jakarta Raya dan karena itu merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab atas keamanan ibukota, sudah ada di istana. Kebiasaan untuk hadir di istana pagi hari sudah dilakukannya sejak Jakarta sering dilanda demonstrasi. Kurang lebih pukul 07.30 ia menerima telepon dari Brigjen Sabur yang masih ada bersama Presiden Sukarno di Istana Bogor. Sabur menanyakan apakah situasi cukup aman untuk mengadakan sidang kabinet. Dalam jawabannya Amir Machmud mengatakan bahwa keamanan dapat dijamin, ⁶⁾ walaupun tentu saja ia sudah menerima laporan tentang akan adanya demonstrasi hari itu.

Berdasarkan jaminan itu, Presiden Sukarno beserta tiga orang Wakil Perdana Menteri (Waperdam), dr. Subandrio, dr. Leimena, Chairul Saleh dan Brigjen Sabur berangkat dari Bogor menggunakan helikopter. Mereka tiba di halaman Istana Merdeka kira-kira pukul 09.00. Dari sini Presiden langsung menuju kamar istana dan setelah berganti pakaian ia pergi ke teras belakang Istana Merdeka. Pada waktu helikopter mendarat di halaman istana, sudah barang tentu Presiden melihat adanya para demonstran di jalan depan istana. Karena itu ia memanggil Amir Machmud dan sekali lagi menanyakan situasi keamanan. Setelah memperoleh jawaban bahwa tidak akan terjadi gangguan terhadap sidang kabinet, barulah Presiden menuju ruangan sidang di bagian belakang Istana Negara. Para menteri sudah hadir di ruangan, kecuali beberapa orang, antara lain, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto dan Menteri Perkebunan Frans Seda karena keduanya sedang sakit.

Presiden memasuki ruangan sidang diiringi oleh Amir Machmud. Pada waktu sidang akan dimulai, Amir minta izin untuk meninggalkan ruangan, tetapi ia ditahan oleh Presiden. Sekalipun Amir mengatakan bahwa ia bukan menteri dan karena itu tidak pantas menghadiri sidang kabinet. Namun Presiden tetap memerintahkan agar ia ikut hadir. Akhirnya ia hadir di ruangan sidang, duduk di tengah-tengah para menteri di baris ketiga. ⁷⁾

Pada awal pidatonya, Presiden meminta menteri-menteri agar lebih mengefektifkan tugas yang sudah dibebankan kepada mereka dan lebih meningkatkan kekompakan sesuai dengan tahapan revolusi yang sedang berlangsung. Para menteri diminta pula supaya mengakhiri pertentangan politik yang ada di antara mereka. Selanjutnya dikatakan oleh Presiden,

"Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota Kabinet Dwikora yang disempurnakan sebagai pembantu-pembantu saya, merupakan kabinet yang betul-betul mengikuti pimpinan saya sebagai Presiden, Perdana Menteri, Pangti, Pemimpin Besar Revolusi, dan semuanya itu harus berdiri di atas ajaran-ajaran saya."

Dengan suara keras dan hampir-hampir berteriak, lebih lanjut ia mengatakan,

"Saya tidak menghendaki seorang pun yang tidak sudi, yang tidak mengikuti pimpinan saya. Kalau ada di antara saudara-saudara tidak benar-benar mengikuti pimpinan saya, lebih baik terang-terangan Ini leader, ini komandan; dia menuntut orang-orang yang dikomandokannya, orang-orang yang dipimpinnya !"

Pada bagian lain Presiden menekankan sekali lagi tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kabinet dan mengingatkan para menteri tentang bahaya mengancam negara. dikatakannya,

"Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini adalah alat revolusi, yang merupakan badan politik yang terutama sekali harus menjalankan perjuangan politik. Oleh karena perjuangan politik itu bermacam-macam romannya, maka sudah barang tentu ada perbedaan politik. Para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu saya, harus berdiri di atas garis pimpinan saya. Dalam meningkatnya perjuangan sekarang ini, memang sudah logis kalau ada kontra revolusi karena kita menentang imperialisme dan meletakkan dasar-dasar menuju masyarakat sosialisme. Sekarang kita

terutama sekali hendak menjebol imperialisme, kolonialisme. Tetapi mereka juga hendak menjebol kita, ada dengan proyek Nekolim "Malaysia" yang sedang meng-*contain* kita, ada dengan basis-basis militer, ada dengan pengacauan ekonomi, macam-macam. Kita terutama sekali menghadapi kontra revolusi tidak hanya berupa serbuan tentera, ekonomi, tetapi juga subversi."

Mengenai sosialisme, gagasan yang sampai saat itu masih dipertahankan oleh Presiden Sukarno, ia mengatakan,

"Sosialisme tidak datang hari esok. Untuk mencapai sosialisme adalah langkah berpuluh-puluh tahun, harus dibina dan diperjuangkan. Saya selalu tandaskan, mengertilah bahwa sosialisme tidak akan datang hari esok, tetapi harus dibina dan diperjuangkan dengan gigih.⁸⁾"

Sementara itu Presiden berpidato, di luar istana para mahasiswa dan pelajar serta rakyat umum sedang melancarkan demonstrasi. Di antara para demonstran itu terdapat anggota-anggota RPKAD dan Kostrad tanpa memakai identitas, tanpa tanda-tanda pengenalan. Mereka mendapat perintah untuk melindungi para demonstran apabila terjadi bentrokan fisik dengan pasukan Cakrabirawa, Jangan sampai para mahasiswa menjadi umpan peluru pengawal istana. Di samping itu RPKAD ingin mengingatkan kepada pengawal istana bahwa para demonstran adalah pembawa aspirasi rakyat. Tindakan untuk melindungi para mahasiswa dan pelajar diperintahkan oleh Letjen Soeharto kepada Kepala Staf Kostrad, Brigjen Kemal Idris.⁹⁾

Kehadiran anggota militer berpakaian tanpa identitas dan tanda pengenalan antara para demonstran diketahui oleh intel Cakrabirawa, tetapi mereka tidak dapat memastikan dari kesatuan mana orang-orang ini berasal. Pihak Kostrad sudah mengatur sedemikian rupa agar kehadiran anggota-anggota RPKAD dan Kostrad ini diketahui oleh Cakrabirawa sehingga dengan demikian mereka tidak akan berani bertindak brutal terhadap para demonstran.¹⁰⁾ Tujuannya hanyalah sekedar mengingatkan pengawal istana. Sama sekali tidak ada niatan mau masuk istana, dengan menakut-nakuti Bung Karno atau berniat mengacau sidang kabinet.

Brigjen Sabur yang mendapat laporan dari intel Cakrabirawa segera menulis nota pada secarik kertas.¹¹⁾ Nota itu ditujukannya kepada Amir Machmud. Dalam nota itu ia meminta agar Amir Machmud keluar dari ruangan sidang sebab di luar ada pasukan tanpa tanda pengenal. Amir Machmud menerima nota itu dari tangan Ajun Komisaris Besar (Letnan Kolonel) Polisi Sumirat yang ditugaskan Sabur untuk menyampaikannya. Dari jauh, Sabur memperhatikan reaksi Amir Machmud. Ternyata Amir tidak beranjak dari tempat duduknya. Bukan saja ia merasa tidak sopan untuk meninggalkan ruangan sidang pada saat Presiden sedang berpidato, tetapi juga karena ia yakin tidak ada bahaya yang mengancam seperti yang diisyaratkan oleh Sabur dalam nota tersebut. Ia sendiri tidak tahu bahwa ada anggota-anggota RPKAD dan Kostrad yang diselundupkan ke tengah-tengah para demonstran.¹³⁾ Kepada Sabur, ia hanya memberi kode dengan gerakan sebagai isyarat tidak ada yang perlu dicemaskan dan sekaligus menolak anggapan Sabur tentang adanya pasukan liar di luar istana.

Sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan Kepala Negara, Sabur tidak puas atas reaksi Amir Machmud. Karena itu ia menulis sebuah nota yang memperlihatkan kecemasannya yang sangat. Dalam nota kedua dikatakannya bahwa masalahnya urgen sekali dan karena itu sangat diharapkannya agar Amir Machmud bersedia keluar. Seperti halnya setelah membaca nota pertama, Amir Machmud tetap tidak beranjak dari tempat duduknya, dan seperti tadi pula ia juga memberikan kode berupa gerakan tangan sebagai pernyataan tidak ada bahaya.

Melihat reaksi dingin Amir Machmud, kecemasan dan kegelisahan Sabur semakin meningkat. Karena tidak mempan terhadap Amir, ia lalu menulis nota yang langsung ditujukan kepada Presiden. Dalam nota itu ditulisnya bahwa di luar ada pasukan tanpa tanda pengenal yang sedang mengepung istana,

bahkan sebagian pasukan itu sudah memasuki pekarangan istana. Karena itu dimintanya agar Presiden segera meninggalkan sidang.

Nota itu disampaikan langsung kepada Presiden oleh Kolonel KKO (sekarang Marinir) Bambang Widjanarko. Setelah membacanya, Presiden tampak gugup. Menurut Jenderal Pol.Pur. Sutjipto Judodihadjo, nota itu berbunyi, "Ada Unidentified force dari arah Glodok menuju istana. Demi keamanan, Bapak supaya meninggalkan sidang." Ia berdiri dari kursi, menghentikan pidatonya yang baru berlangsung lima belas menit, dan berkata, "Perkembangan baru telah terjadi." Sesudah itu ia mengumumkan bahwa sidang diskors untuk sementara waktu. Ia juga memerintahkan Waperdam II dr. Leimena untuk memimpin sidang selanjutnya setelah selesai skorsing.

Setelah melakukan kedua hal tersebut, Presiden Sukarno meninggalkan ruangan sidang. Ia diikuti oleh Bambang Widjanarko, Sabur dan Amir Machmud. Baru beberapa langkah berjalan, ia mengajak Subandrio supaya mengikutinya. Chairul Saleh kemudian juga meninggalkan sidang. Para menteri yang masih tinggal di ruangan itu umumnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi.

Pada waktu Presiden berjalan di tangga antara Istana Negara dan Istana Merdeka, ia didekati oleh Amir Machmud. Panglima ini berusaha menenangkan Presiden dan sekaligus meyakinkannya bahwa tidak ada pasukan tanpa tanda pengenal di sekeliling istana. Amir juga menegaskan bahwa ia sudah mendapat perintah khusus dari Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga keselamatan pribadi Presiden.

Kata-kata Amir ternyata tidak berhasil meyakinkan Presiden. Ia hanya meminta supaya Amir mengantarkan ke pesawat helikopter yang sedang diparkir di halaman depan Istana Merdeka. Sementara itu Subandrio dan Chairul Saleh sudah datang menyusul. Bersama-sama dengan Brigjen Sabur mereka menaiki helikopter dan terbang ke Bogor.

Setelah masa skorsing berakhir, sidang kabinet dibuka kembali oleh Waperdam II Leimena, setelah ada laporan dari Amir Machmud bahwa Presiden sudah berangkat ke Bogor. Leimena berbicara singkat, hanya sekedar untuk menutup sidang kabinet. Tidak ada penjelasan lain yang disampaikan sebab ia sendiri pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, kecuali adanya nota dari Sabur kepada Presiden. Kemudian Leimena sendiri menyusul Presiden ke Bogor.

Dengan demikian, sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966 itu gagal merumuskan sesuatu dan tidak menghasilkan keputusan apa pun. Tetapi ekor dari kegagalan itu, khususnya perkiraan Presiden Sukarno tentang keamanan yang tak dapat dikendalikan lagi, ternyata melahirkan sesuatu yang cukup penting dan menentukan untuk kehidupan negara selanjutnya. Hanya saja, perkembangan yang terjadi sesudah sidang kabinet yang gagal itu, ternyata menyimpang dari strategi Presiden Sukarno, bahkan menghacurkan strategi yang sudah disusun untuk mempertahankan kepemimpinannya. Awal perkembangan baru itu ditentukan di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966 hari itu juga.

2. Pembicaraan di Istana Bogor.

Di tangga bagian barat Istana Negara, sesudah sidang kabinet dibubarkan, Mayjen Basuki Rachmat, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Mayjen Mursid, Deputy II Men/Pangad, membicarakan situasi yang baru terjadi. Amir Machmud datang menggabungkan diri. Ia menyesalkan tindakan Sabur mengirimkan nota kepada Presiden tanpa menyelidiki lebih lanjut apa yang dikatakannya pasukan tanpa tanda pengenal. M. Yusuf mengajak mereka berangkat ke Bogor menemui Presiden untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya, sekaligus menghilangkan anggapan Presiden seolah-olah ia sudah ditinggalkan oleh Angkatan Darat. Kecuali Mursid, yang lainnya menerima ajakan Yusuf.

Sesudah itu Basuki, Yusuf, dan Amir berangkat ke rumah Me/Pangad Letnan Jenderal Soeharto di Jalan Agus Salim untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di istana dan sekaligus untuk minta izin menemui Presiden di Bogor. Mereka diterima oleh Soeharto, meskipun masih dalam keadaan sakit, di kamar tidur. Ia duduk ditempat tidur, mengenakan piyama dan sarung, sedangkan ketiga tamunya duduk di kursi yang ditempatkan menghadap tempat tidur.¹⁵⁾ Mayor Jenderal Basuki Rachmat menjelaskan maksud dan tujuan mereka bertiga menghadap. Setelah melaporkan peristiwa yang terjadi di istana, mereka bermaksud untuk menemui Presiden di Bogor.

Letnan Jenderal Soeharto menyetujui rencana ketiga perwira tinggi itu untuk berangkat ke Bogor. Letnan Jenderal Soeharto memberikan petunjuk, bahwa usaha pokok yang harus diutamakan adalah menyelamatkan konstitusi dengan sebaik-baiknya, beserta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Berdasarkan atas prinsip-prinsip itu pak Harto bersedia memikul tanggung jawab apabila kewenangan untuk itu diberikan kepada beliau untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik berdasarkan Tri Tuntutan Rakyat.¹⁶⁾ Akhirnya Soeharto berkirim salam untuk Presiden, dan menitipkan pesan mengenai kesanggupannya mengatasi keadaan, apabila Presiden memberikan kepercayaan kepadanya.

Dari rumah Letnan Jenderal Soeharto, para perwira tinggi ini kembali lagi ke istana. Mereka merundingkan soal keberangkatan ke Bogor. Sesudah itu mereka berangkat dengan menggunakan helikopter. Salah seorang meyarankan untuk membawa senjata sekedar untuk mempertahankan diri sekiranya ada yang berniat jahat terhadap mereka karena situasi Bogor tidak diketahui dengan pasti. Saran itu ditolak oleh yang lain karena dianggap tidak ada gunanya.¹⁷⁾

Selama dalam penerbangan ke Bogor ketiga perwira tinggi hampir-hampir tidak berbicara apa-apa. Amir Machmud, seperti yang dikatakannya kemudian, hanya membaca ayat-ayat suci Al

Qur'an dan berdoa. Menurut Amir, mulut Basuki Rachmat dan Yusuf komat-kamit dan menurut anggapannya mereka juga berdoa.¹⁸⁾

Mereka tiba di Istana Bogor kira-kira pukul 13.00 tanpa mengalami rintangan dari pasukan Cakrabirawa yang mengawal istana itu. Keadaan sekitar istana tampak seperti biasa, tidak ada hal-hal yang menyolok.

Mereka diterima oleh Sabur. Karena Presiden Sukarno sedang istirahat, mereka terpaksa menunggu. Kurang lebih pukul 14.30 kemudian Presiden sudah bangun dan ia bersedia menerima rombongan perwira tinggi itu. Ia tampak menahan marah. Pada awal pertemuan itu suasana cukup tegang. Mayor Jenderal Basuki Rachmat sebagai salah seorang yang tertua dan juga mendapat petunjuk dari Letnan Jenderal Soeharto menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka ada hubungannya dengan peristiwa di Istana Negara pagi hari itu. Ia mencoba menyakinkan Presiden bahwa sebenarnya tidak ada pasukan tanpa identitas yang mengepung istana. Selanjutnya ia memohon agar Presiden tidak merasa ditinggalkan oleh Angkatan Darat.

Presiden menumpahkan amarahnya kepada Amir Machmud. Ia menuduh Amir membohonginya. Sesudah agak tenang, dengan suara biasa ia menanyakan situasi Jakarta setelah sidang kabinet dibubarkan. Pada kesempatan ini para perwira menyampaikan pesan Letnan Jenderal Soeharto tentang kesanggupannya mengatasi keadaan apabila Presiden memberikan kepercayaan kepadanya. Rupanya hal ini cukup menarik perhatian Presiden Sukarno. Sejak saat itu sampai pukul 17.00 terjadi dialog yang terus terang, tetapi cukup menegaskan. Akhirnya beliau menanyakan bentuk kongret dari pemberian kepercayaan itu. Para perwira mengusulkan agar pemberian kepercayaan itu dituangkan dalam dokumen tertulis dan resmi. Ternyata, mereka menyarankan agar Presiden Sukarno memberikan perintah tertulis kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk bertindak, atas nama Presiden, mengatasi keadaan. Ternyata Presiden setuju. Ia memerintahkan

keempat perwira tinggi itu untuk menyusun konsep surat tersebut. Karena di Istana Bogor ada tiga orang Waperdam, ¹⁹⁾ Amir Machmud berpendapat bahwa ketiga Waperdam itu sebaiknya diikutsertakan dalam menyusun konsep. Pendapat itu pun disetujui Presiden. Sesudah itu dibentuk tim yang diketuai oleh Basuki Rachmat, sedangkan Sabur sebagai sekretaris. Amir Machud tidak duduk dalam tim, walaupun dalam kenyataannya ia turut mengambil bagian dalam penyusunan konsep. ²⁰⁾

Mungkin disebabkan usul penyusunan surat datang dari para perwira, maka ketiga Waperdam tidak ikut menyusun konsep. Mereka hanya ikut membahas setelah konsep itu selesai.

Penyusunan konsep dilakukan di ruangan tengah paviliun Istana Bogor tempat tinggal Nyonya Hartini Sukarno. Setelah selesai, konsep yang masih berupa tulisan tangan Sabur itu diperlihatkan kepada Presiden. Ia memanggil ketiga Waperdam untuk turut membahasnya. Pembahasan berlangsung cukup serius dan kadang-kadang agak tegang. Beberapa rumusan yang terdapat dalam konsep diamendir oleh Presiden dan para Waperdam. Subandrio menganggap bahwa pemberian kekuasaan yang dirumuskan dalam konsep itu terlalu luas sifatnya. ²¹⁾ Selain itu ia juga mengusulkan agar diadakan beberapa perubahan redaksional yang tidak begitu prinsipil. ²²⁾ Pada diskusi ini letiga perwira tinggi ini tidak puas dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Setelah diadakan beberapa perubahan sebagai hasil diskusi antara Presiden dan para Waperdam di satu pihak dan tiga perwira tinggi di pihak lain, akhirnya tersusun draft yang disetujui oleh kedua pihak. Selanjutnya naskah yang masih berbentuk draft itu diserahkan kepada Sabur untuk diketik sesuai dengan dukannya sebagai sekretaris tim.

Sesudah Magrib, Presiden, para Waperdam dan ketiga perwira tinggi berkumpul di meja makan, paviliun. Selain itu hadir pula Nyonya Hartini Sukarno dan Pangdam VI/Siliwangi, Ibrahim Adjie. Panglima Siliwangi saat siang itu ditelepon oleh

seseorang dari Jakarta. Orang itu menceritakan peristiwa yang terjadi dalam sidang kabinet dan menyarankan agar Adjie menemui Presiden di Bogor. Semula Adjie bermaksud berangkat dari Bandung dengan helikopter, tetapi karena cuaca buruk, ia berangkat menggunakan mobil. Di Bogor, Adjie singgah terlebih dahulu di rumah Alex Prawiraatmaja, Komandan Korem Bogor. Sesudah mencuci muka, ia langsung menuju istana dan tiba di tempat ini pada saat Presiden dan yang lain-lain akan mulai makan malam. Karena itu ia diajak untuk makan bersama.²³⁾

Suasana di ruangan makan itu cukup santai. Sabur yang telah selesai mengetik konsep, memasuki ruangan dan menyerahkan hasil ketikkannya kepada Presiden. Ia mengatakan bahwa secara teknis administratif, surat itu masih ada kekurangannya sebab perkataan pertama pada halaman kedua tidak dicantumkan pada bagian bawah halaman pertama.²⁴⁾ Juga surat perintah ini terdiri dari 2 halaman. Amir-Machmud cepat menyela dengan mengatakan bahwa dalam suasana revolusi orang tidak perlu memperhatikan hal-hal kecil dan tidak prinsipil.²⁵⁾ Presiden mengambil naskah dari tangan Sabur dan membacanya. Sesudah itu ia menyerahkan kepada para waperdam agar turut membaca. Pada saat Presiden menerima kembali naskah itu untuk ditandatangani, ia tampak ragu-ragu, menandatangani atau tidak. Suasana hening. Semua mata tertuju kepada Presiden. Para perwira merasakan situasi cukup mencekam. Mereka menunggu saat tangan Presiden memegang pena dan membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut.

Akhirnya keragu-raguan Presiden hilang dan surat itu ditandatangani.²⁷⁾ Surat itulah yang kelak dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (sering dipendekkan dengan Supersemar atau SP 11 Maret). Surat Perintah tersebut berbunyi seperti di bawah ini :

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
S U R A T - P E R I N T A H**

I. MENGINGAT :

1. 1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik Nasional maupun Internasional;
1. 2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966;

II. MENIMBANG :

2. 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintah dan djalannja Revolusi;
2. 2. Perlu adanya djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.

III. MEMUTUSKAN/MEMERINTAHKAN :

Kepada : LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

UNTUK : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi

mimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS dan demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi;

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya;
3. Supaja melaporkan segala jang bersangkutan/bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. S e l e s a i.

Djakarta, 11 Maret 1966

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS**

ttd.,

S U K A R N O

Sesudah ditandatangani oleh Presiden, surat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Basuki Rachmat untuk disampaikan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Pertemuan itu pun bubar dan ketiga perwira tinggi minta izin untuk kembali ke Jakarta. Di tengah istana Ibrahim Adjiea mengatakan kepada Basuki Rachmat bahwa surat itu cukup kuat sebagai dasar hukum bagi Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan PKI. Ia juga menyampaikan pesan agar Letnan Jenderal Soeharto segera mengambil tindakan untuk membubarkan partai tersebut. ²⁸⁾

3. Briefing malam hari di Markas KOSTRAD

Berbeda dengan keberangkatan ke Bogor, Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud kembali ke Jakarta menggunakan mobil. Seperti halnya dalam helikopter pada waktu itu berangkat, dalam mobil pada waktu pulang mereka juga tidak banyak berbicara. Ketiganya sudah melewati saat-saat kritis, terutama pada waktu Presiden Sukarno tampak ragu-ragu untuk menandatangani surat perintah yang sudah mereka susun dan sudah didiskusikan baik dengan Presiden maupun dengan para Waperdam.

Suatu hal yang agak penting yang mereka bicarakan dalam mobil ialah arti yang terkandung dalam surat perintah itu. Di luar kota Bogor, Amir Machmud dengan menggunakan cahaya senter membaca kembali surat perintah itu setelah meminjamnya dari Basuki Rachmat. Setelah membacanya dan merenungkan isinya, ia sampai kepada kesimpulan bahwa surat itu tak lain dari penyerahan kekuasaan oleh Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Basuki Rachmat dan Yusuf dipersilakan membaca kembali. Kedua perwira ini pun sependapat dengan kesimpulan Amir Machmud, ²⁹⁾ sesuatu yang tidak terpikirkan oleh mereka sewaktu berada di Istana Bogor.

Waktu sudah menunjukkan kira-kira pukul 21.30 ketika Basuki Rachmat, M. Yusuf, dan Amir Machmud tiba kembali di Jakarta. Mereka langsung menuju rumah Letnan Jenderal Soeharto. Seperti pada waktu melapor akan berangkat ke Bogor, mereka juga diterima Soeharto di kamar tidur. Kesehatan Soeharto tampak agak membaik dibandingkan dengan keadaannya siang hari itu. Ia membaca dengan teliti surat yang diserahkan kepadanya oleh Basuki Rachmat. Wajahnya tidak memperlihatkan rasa terkejut atau gembira. Kepercayaan yang diberikan Presiden Sukarno kepadanya dalam surat itu dinilainya sebagai hasil yang wajar dari dialog-dialog yang sudah berulang kali diadakannya dengan Presiden. Surat itu diserahkannya kembali kepada Basuki Rachmat.

Walaupun kesehatannya belum pulih benar, namun Letnan Jenderal Soeharto memutuskan untuk menerima secara resmi dan akan mengadakan briefing malam itu juga di Markas Kostrad. Ia ingin segera menginformasikan adanya surat perintah itu kepada para panglima dari angkatan-angkatan lain, perwira-perwira ABRI dan tokoh-tokoh politik serta eksponen mahasiswa yang dianggapnya perlu segera mengetahuinya. Basuki Rachmat, Yusuf, dan Amir Machmud dimintanya hadir dalam briefing itu.

Briefing dimulai kurang-lebih pukul 11.00 malam. Hadir dalam briefing itu para panglima daerah yang kebetulan sedang ada di Jakarta. Menurut rencana, tanggal 12 Maret 1966 mereka akan menghadiri rapat yang akan dipimpin oleh Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Tampak pula hadir Men/Pangal Laksamana Mulyadi, Letjen Sarbini dan Pangkostrad Umar Wirahadikusumah Kepala Staf Kostrad Kemal Idris, M. Panggabean (Wapangad), Alamsyah Ratuperwiranegara, dan Yoga Sugomo. Wakil-wakil Front Pancasila hadir antara lain K.H. Masykur, Subchan Z.E., dan Harry Chan Silalahi yang pada malam itu dijemput dari rumah masing-masing. Beberapa orang wakil KAMI tampak pula mengikuti briefing itu, seperti Cosmas Batubara, Sulastomo, David Napitupulu, dan Zamroni. Mereka sengaja dibangunkan dari tempat "persembunyian" mereka di Markas Kopur II (Komando Tempur II) Jalan Taman Kebon Sirih oleh Brigjen Kemal Idris.³⁰⁾

Letnan Jenderal Soeharto meminta Basuki Rachmat menguraikan peristiwa yang terjadi di Istana Bogor dan kemudian membacakan Surat Perintah 11 Maret. Sesudah itu ia memerintahkan Brigjen Sutjipto, S.H. dan beberapa orang perwira ahli hukum lainnya untuk menyusun konsep surat keputusan pembubaran PKI. Surat itu ditandatangani Letnan Jenderal Soeharto lewat tengah malam. Ia menandatangani atas nama Presiden Sukarno. Tindakan membubarkan PKI dan menyatakan bahwa komunisme sebagai ideologi yang telarang di seluruh Indonesia diambilnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya oleh Surat Perintah 11 Maret.

CATATAN BAB II

- 1). Partai-partai politik dan organisasi massa penandatangan pernyataan yang dimaksud IPKI (Ny. H. Aminah Hidayat, A. Sukarmadidjaja, Brigjen. Drs. A. Sukendro), Muhammadiyah (Marzuki Yatim, Letjen Muljadi Djojomartono, Ir. Sanusi), NU (K.H.A. Dahlan, K.A.A. Sjaichin, Subchan ZE), Partai Katholik (I.J. Kasimo, R.G. Duriat, F.C. Palaoensuka), Parkindo (M. Siregar, J.C.T. Simorangkir, A. Wenas), Partindo (Asmoro Hadi, Moh. Supardi, Ismuwil) Perti (Rusli Holil, H. Abdurrachman, T. Mardjohan), PNI Front Marhaenis (Ali Sastroamidjojo, Ir. Surachman, J. Lumengkewas), PSII (Arudji Kartawinata, Harsono Tjokroaminoto), *Berita Yudha*, 11 Maret 1966.
- 2). Bahwa pernyataan itu dikeluarkan karena adanya tekanan dari Presiden Sukarno, terbukti dari pernyataan bantahan yang dikeluarkan Front Pancasila dan pernyataan intern beberapa partai pada tanggal 11 Maret 1966 (diumumkan melalui media massa pada tanggal 12 Maret 1966). Isi pernyataan itu merupakan ralat dari pernyataan tanggal 10 Maret 1966 (lihat *Angkatan Bersenjata*, 12 Maret 1966, hal 1).

- 3) Sejak tanggal 3 Maret 1966 pemerintah menutup Universitas Indonesia dan menghentikan semua kegiatan perkuliahan. Mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari lima orang. Untuk mengamankan keputusan itu, satuan-satuan ABRI di ditempatkan di Kampus UI di Salemba.
- 4). Wawancara dengan Marzuki Yatim, Jakarta, 7 Juni 1971.
- 5). Wawancara dengan Jenderal Pol.Pur. Sutjipto Judodihardjo, Jakarta, tanggal 18 Agustus 1971.
- 6). Wawancara dengan Jenderal Pur. Amir Machmud, Jakarta, 14 April 1983; lihat juga Amir Machmud, "Naskah Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan LKBN Antara mengenai Supersemar," Jakarta 1984, hal 3.
- 7). Amir Machmud, *op.cit.*, hal. 4.
- 8). *Angkatan Bersendjata, 12 Maret 1966.*
- 9). Wawancara dengan Letjen Kemal Idris, 8 Mei 1984.
- 10). Wawancara dengan Letjen Kemal Idris, 8 Mei 1984.
- 11). Menurut Kemal Idris, nota yang dikirim Sabur kepada Amir Machmud dan kemudian kepada Presiden merupakan hasil "permainan" anak-anak Kostrad (lihat Mochtar Lubis, *Catatan Subversi*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hal. 449 dan 452).
- 12). Wawancara dengan Letjen Sarwo Edhie, 13 September 1982.
- 13). Wawancara dengan Amir Machmud, 14 April 1983.
- 14) Uraian mengenai situasi kamar diperoleh dari keterangan lisan Drs. G. Dwipayana sesuai dengan hasil wawancaranya dengan Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto.
- 15) Letnan Jenderal M. Yusuf, "Pengalaman saya dengan Supersemar", Pedoman, 17 Maret 1973.
- 16) Wawancara dengan Amir Machmud, 14 April 1983
- 17) Amir Machmud, *op.cit.*, hal. 6
- 18) Pada waktu itu Waperdam II dr. Leimena sudah ada pula di Istana Bogor. Ia tiba lebih dahulu daripada Basuki Rachmat dan kawan-kawannya.

- 19) Amir Machmud, *op.cit.*, hal. 7
- 20) Wawancara dengan dr. Subandrio, tanggal 29 Mei 1984
- 21) Amir Machmud, *op.cit.*, hal.
- 22) *Berita Buana*, 10 Maret 1980. Amir Machmud tidak menyinggung sama sekali kehadiran Ibrahim Adjie di Istana Bogor pada saat itu. Sebaliknya, Ny. Hartini menyatakan bahwa ialah yang mengambilkan piring makan untuk Adjie.
- 23) Amir Machmud, *Op.Cit.*, hal. 8
- 24) Amir Machmud, *op. cit.*, hal. 8. Naskah asli surat perintah itu terdiri atas dua halaman, berbeda dengan yang sekarang diketahui oleh umum yang hanya terdiri atas satu halaman.
- 25) Menurut Amir Machmud, keragu-raguan Presiden hilang setelah Amir memintanya mengucapkan bismillah terlebih dahulu (wawancara dengan Amir Machmud, 14 April 1983) Keterangan dibantah baik oleh Sabur (wawancara tanggal maupun oleh Ny. Hartini (wawancara tanggal M. Yusuf juga tidak menyebut-nyebut soal pembacaan bismillah ini (lihat keterangan M. Yusuf dalam *Pedoman*, 17 Maret 1983.
- 26) *Berita Buana*, 10 Maret 1980
- 27) Amir Machmud, *op. cit.*, hal. 8
- 28) Wawancara dengan Letjen Kemal Idris, tanggal 8 Mei 1984.

BAB III

MEMASUKI ERA ORDE BARU

1. Penggunaan SP 11 Maret 1966

Apabila di luar Istana Negara sedang berlangsung pawai, maka pada pagi hari tanggal 12 Maret Presiden Sukarno bertempat di Istana Negara sedang memimpin rapat para Panglima ABRI seluruh Indonesia. Hadir pada rapat itu tiga orang Waperdam, Menko Pertahanan Mayjen Sarbini, Men/Pangal Laksamana Mulyadi, Men/Pangau Laksamana Muda Sri Muljono Herlambang serta Men/Pangak Jenderal Polisi Sucipto Yudodihardjo. Seusai rapat Presiden kembali ke Bogor, Pukul 14.00 tanggal 12 Maret itu juga RRI Jakarta menyiarkan keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden mengenai pembubaran PKI, Pembubaran PKI ini dituangkan dalam Keputusan No. 1/3/1966. ¹⁾ Pada hari yang sama telah pula dikeluarkan pula Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi ABRI yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto ditujukan kepada seluruh anggota ABRI yang antara lain menjelaskan bahwa :

1. Bagi rakyat hal ini berarti bahwa hati nurani rakyat yang selama itu dituangkan dalam perjuangan yang penuh keikhlasan, kejujuran, heroisme dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita cintai dan juga merupakan bukti kecintaan Pemimpin Besar Revolusi kepada kita semua.
2. Setiap bantuan dukungan dan ikut sertanya Rakyat dalam membantu saya hendaknya dilakukan tertib dan tidak bertindak sendiri-sendiri, setiap gerakan dan tindakan dalam rangka bantuan terhadap tugas-tugas berat ABRI hendaknya tetap dipimpin dan terkendali, serta keinginan dan hasrat hendaknya disalurkan dalam rangka Demokrasi Terpimpin. ²⁾

Selanjutnya untuk menjaga tetap lancarnya roda pemerintahan, baik di daerah-daerah maupun di pusat, Presiden Sukarno mengeluarkan Pengumuman No. 3, ³⁾ dan Pengumuman No. 4. ⁴⁾ Keduanya bertanggal 12 Maret 1966. Begitu pula untuk mencegah spekulasi dan menjaga supaya bahan-bahan kebutuhan rakyat tidak hilang dari pasaran, dikeluarkan Pengumuman No. 2 ⁵⁾ tanggal 12 Maret itu juga. Semua Keputusan itu ditanda-tangani oleh Letjen Soeharto atas nama Presiden.

Presiden Sukarno terkejut mendengar PKI dibubarkan. Kemudian ia mengutus Dr. Leimena menemui Jenderal Soeharto serta menyampaikan surat yang isinya memerintahkan untuk kembali kepada pelaksanaan Surat Perintah Presiden/Pangti/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis belaka dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Pokoknya Presiden Sukarno ingin meminta pertanggungjawaban Jenderal Soeharto. Kepada Leimena, Letnan Jenderal Soeharto menjelaskan bahwa tindakan yang diambilnya tidak bertentangan dengan SP 11 Maret. Ia memperlihatkan kalimat yang terdapat dalam surat perintah tersebut yang berbunyi, "Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan". Oleh

Letnan Jenderal Soeharto dijelaskan kepada Leimena bahwa tindakan yang telah diambilnya tidak menyalahi isi surat perintah baik secara teknis maupun politis. Tindakannya itu dilaksanakan untuk menyelamatkan Pancasila, UUD '45 serta menyelamatkan revolusi Indonesia. Tindakan pembubaran terhadap PKI, karena partai politik itu secara terang-terangan memusuhi Pancasila. Hal ini sebenarnya sudah sering dibicarakan dengan Presiden. Rupanya Presiden masih belum merasa yakin dengan penjelasan itu, sehingga ia kemudian mengutus ajudannya Kolonel Bambang Widjanarko. Setibanya di rumah Letnan Jenderal Soeharto, ia menyampaikan kekhawatiran Presiden Sukarno bahwa Soeharto sudah melakukan kudeta. "Bung Karno menuduh Bapak berusaha menggulingkan beliau", ucap Widjanarko. "Itu tidak benar" jawab Letnan Jenderal Soeharto. Tidak ada niatan dirinya akan menjatuhkan Bung Karno. Ia tetap mengakui Bung Karno seorang pejuang besar, sebagai Pangti ABRI dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Pembubaran PKI semata untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bambang Widjanarko melaporkan kepada Presiden hasil pembicaraannya dengan Letnan Jenderal Soeharto pada hari itu juga. Presiden Sukarno merasa masih belum puas dengan penjelasan yang telah diterima dari kedua utusan terdahulu. Kemudian tiga orang perwira tinggi yang membawa SP 11 Maret dipanggil ke Bogor. Di hadapan Jenderal Basuki Rachmat, M. Yusuf dan Amir Machmud, Presiden menyatakan dengan nada marah bahwa Surat Perintah 11 Maret yang diberikan kepada Soeharto bukan untuk membubarkan PKI, tetapi hanya untuk menyelamatkan Pancasila, UUD '45 dan revolusi. "Tidak ada tercantum sepatah kata pun untuk membubarkan PKI", ucap Presiden dengan nada marah. Meskipun ketiga perwira tinggi itu menjelaskan kepada Presiden seperti apa yang telah disampaikan oleh Letnan Jenderal Soeharto kepada Leimena, yaitu bahwa PKI dibubarkan karena PKI berkhianat dan akan menghancurkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45. Namun Presiden tetap bersikeras pada pendiriannya, bahwa pembubaran itu tidak benar serta tetap menyalahkan tindakan

Soeharto. "Sampaikan kepada Soeharto tindakannya itu salah" kata Presiden.

Pada waktu ketiga perwira tinggi akan kembali ke Jakarta, datang Menteri Penerangan Achmadi. Ketika perwira tinggi itu diperintahkan menunggu di luar. Rupanya oleh Menteri Achmadi disarankan agar Presiden Sukarno jangan ke Jakarta, diduga **Soeharto dan rezimnya sedang menyusun kabinet baru**. Presiden kemudian memanggil ketiga perwira tinggi itu serta menanyakan : "Apakah betul Soeharto sedang menyusun kabinet baru. Kalau saya ke Jakarta disuruh menanda tangani ?" Lalu Amir Machmud dan M. Yusuf menanyakan sumber beritanya : "Dari Achmadi" kata Presiden. Yusuf dan Amir Machmud secara tegas membantah, setelah itu Presiden berangkat ke Jakarta. Ketiga perwira tinggi itu akan kembali ke Jakarta. Tetapi mereka seolah-olah ditahan di sana, karena ketika akan kembali ke Jakarta menggunakan mobil ternyata mobilnya tidak ada. Lalu berusaha meminjam Helikopter. Ternyata pilotnya memberikan alasan pesawatnya tidak jalan. Terpaksa mereka harus menunggu sampai magrib. Kebetulan saat itu ajudan Presiden Kolonel Bambang Widjanarko akan ke Jakarta, sehingga mereka bertiga bisa ikut serta menuju istana Merdeka. Di sana ternyata sedang berlangsung pembicaraan antara Presiden Sukarno dengan Letnan Jenderal Soeharto. Sambil mendekati Presiden Sukarno, Amir Machmud pada kesempatan itu mengingatkan kembali ketergantungannya kepada Presiden bahwa tidak terjadi perubahan kabinet serta beliau tidak dipaksa untuk menandatangani perubahan kabinet. Hal ini dibenarkan oleh Bung Karno.⁶⁾ Kemudian untuk menjernihkan suasana, maka diadakan pertemuan antara Presiden Sukarno dengan para pembantu terdekatnya di satu pihak dan Jenderal Soeharto dengan para Panglima Angkatan di pihak lain. Dalam pertemuan tanggal 16 Maret, Soeharto menjelaskan kepada Presiden Sukarno bahwa sesudah PKI dibubarkan serta dinyatakan terlarang, maka sebenarnya orang-orang PKI atau orang-orang yang bersimpati pada PKI tidak mempunyai hak lagi untuk duduk dalam kabinet. Berarti

personalia dan susunan kabinet harus ditinjau kembali. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka rakyat tetap akan bergerak serta melancarkan tuntutan-tuntutannya. Kemudian Sri Muljono Herlambang secara tegas menyatakan bahwa tokoh utama yang tidak dapat diterima rakyat ialah Dr. Subandrio. Diusulkannya agar dikeluarkan dari kabinet. Presiden menyetujui usul itu, sedang mengenai perubahan kabinet Presiden berjanji akan mempertimbangkan.⁷⁾ Bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan itu, ternyata pada hari yang sama Presiden telah mengeluarkan pengumuman No. 1, hari Rabu tanggal 16 Maret 1966.⁸⁾ Dalam pengumuman itu, yang dibacakan oleh Waperdam III Dr. Chairul Saleh, dinyatakan bahwa **Presiden mempunyai kebebasan penuh untuk menunjuk pembantu-pembantunya.** Presiden sangat menyesalkan adanya sikap dan usaha sebagian masyarakat untuk memaksakan kehendaknya, lebih-lebih secara ultimatif, mengenai pembantu-pembantu Presiden. Presiden selalu bersedia mempertimbangkan setiap bantuan dan sumbangan pemikiran yang diajukan sesuai dengan tata cara dan kepribadian bangsa kita. Selanjutnya Presiden mengingatkan kepada seluruh rakyat akan kewajibannya mutlak terhadap ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Penyimpangan daripadanya adalah penyelewengan yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa".⁹⁾ Pengumuman tersebut ternyata tidak berhasil meredakan suasana. Para mahasiswa, pelajar dan pemuda tetap melancarkan aksi-aksi mereka. Puluhan ribu massa pemuda, mahasiswa, pelajar Jakarta dan Bandung membanjiri gedung DPR-GR di Senayan. Mereka diterima oleh pimpinan DPR-GR K.H. Achmad Sjaichu dan Brigjen Sjarif Thayeb, dan menyampaikan tuntutan agar Presiden/Panglima Tertinggi segera merombak Kabinet secara fundamental dan integral, sehingga bersih dari unsur Gestapu/PKI kaum plin-plan dan vested interest. Rumah Waperdam Dr. Subandrio didatangi oleh massa mahasiswa, dengan maksud untuk mengamanakannya.¹⁰⁾ Pada tanggal 17 Maret mereka melancarkan gerakan pengamanan terhadap tiga orang menteri, yaitu : Prof. Dr. Prijono,

Astrawinata, SH. dan G.G. Subamia. Ketiganya diambil dari kantor mereka dan selanjutnya dibawa ke Konstrad. ¹¹⁾

Sementara itu pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 1966, suasana tegang nampak di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah yang termasuk Daerah Lingkaran Pengamanan Istana. Sebenarnya pengawalan ABRI di tempat-tempat itu di hari-hari sebelumnya memang sudah merupakan pemandangan yang biasa. Tetapi pada hari itu terjadi pergantian pasukan pengawal. Bila hari-hari sebelumnya, pengawalan dilakukan oleh kesatuan-kesatuan Brimob, KKO ataupun kesatuan Siliwangi, maka pagi hari tanggal 18 Maret itu pengawalan diserahkan kepada RPKAD, Batalyon Siliwangi Kujang, Kesatuan Kaveleri, dan Batalyon F/Diponegoro. Di sekitar Air Mancur Jalan Thamrin, Budikemulyaan, Merdeka Barat dan Merdeka Selatan. Hotel Duta Indonesia (Duta Merlin), Jalan Nusantara, Jalan Pintu Air, Jalan Katedral dan Pejambon dipenuhi oleh satuan-satuan itu. Di beberapa perapatan jalan kelihatan tank-tank dan panser-panser. Kehadiran tank-tank dan panser-panser itu sendiri telah menimbulkan ketegangan serta menimbulkan tanda tanya pada masyarakat. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pada hari itu satuan-satuan ABRI yang mengadakan pengawalan dalam keadaan siap tempur.

Lalu lintas dalam kota pagi itu tampak seperti biasa, kecuali di tempat-tempat di mana pengawalan diadakan. Di tempat ini setiap kendaraan yang lewat diperiksa. Hubungan ke luar kota boleh dikatakan berhenti sama sekali. Begitu pula pesawat-pesawat terbang untuk hubungan ke luar negeri, dibatasi. Orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri diharuskan menunda keberangkatannya.

Suasana seperti ini menimbulkan dugaan pada penduduk ibukota akan ada sesuatu yang bakal terjadi. Peningkatan kesiagaan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Kamis malam tanggal 17 Maret 1966. RRI Jakarta, di luar kebiasaan, telah

menyiarkan warta berita pada pukul 19.00 dan 20.00 WIB. Begitu pula TVRI tidak menyiarkan siaran berita pada pukul 20.00.

Perubahan-perubahan telah terjadi pula pada pengelolaan mass-media. Berdasarkan Surat Perintah 11 Maret, demi mengadakan penertiban dalam soal-soal mass-media, baik yang bersifat lokal maupun nasional, pada tanggal 16 Maret Presiden mengeluarkan Surat Perintah No. 8/3/1966.¹²⁾ Surat Perintah ini berisi ketentuan tentang pembentukan team untuk mengkoordinir dan **menertibkan** soal-soal mass-media, yaitu radio, TV dan pers. Untuk mengkoordinir pekerjaan tersebut, maka Brigjen Ibnu Subroto, Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspenad), di angkat sebagai Koordinator. Berdasarkan Surat Perintah di atas, pada tanggal 17 Maret 1966. Koordinator Penerbit Mass-Media itu mengeluarkan Surat Perintah No. PRIN/001/PUS.P/3/1966 berisi instruksi ditujukan kepada Direktur Jenderal RRI Pusat dan Direktur TVRI agar siaran-siaran berita mengenai bidang politik, ekonomi dan militer h harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. Surat Perintah itu disusul dengan Pengumuman No. 001/SUS tanggal 18 Maret,¹³⁾ yang menentukan bahwa soal-soal mass-media langsung ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Penerangan Angkatan Darat. Pengumuman yang terakhir ini dibacakan oleh Brigjen Ibnu Subroto melalui RRI Jakarta sesudah siaran warta berita pukul 08.00 pagi tanggal 18 Maret.

Pengumuman Kepala Puspenad itu disusul dengan Pengumuman No. 1/Peng/1966 dari Menteri Panglima Angkatan Darat tentang pencegahan tindakan-tindakan pasukan-pasukan yang tidak terkendalikan, tindakan ini diambil berdasarkan kenyataan adanya gejala-gejala gejolak massa rakyat yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum.¹⁴⁾ Selanjutnya RRI Pusat menginstruksikan kepada RRI Daerah agar terus menerus berada di udara dan me-relay siaran-siaran RRI Pusat. Melalui pengumuman-pengumuman itu dan dengan absennya siaran RRI Pusat (dalam hal ini siaran berita) malam tanggal 17 Maret,

ketegangan sesungguhnya telah menjalar ke daerah-daerah di luar ibukota.

Kira-kira pukul 09.00 pagi, Presiden Sukarno dengan dikawal oleh anggota Men Cakrabirawa meninggalkan Istana Merdeka dengan berkendara mobil. Rombongan Presiden distop oleh anggota RPKAD yang sedang mengawal didekat Air Mancur. Setelah diperiksa rombongan diperbolehkan meneruskan perjalanan. Rombongan Presiden Sukarno dengan mengambil rute Jln. Iman Bonjol - Diponegoro, Matraman langsung menuju Bogor.¹⁵⁾ Sampai saat Presiden meninggalkan Istana tidak terjadi sesuatu. Pasukan-pasukan ABRI tetap dalam keadaan siaga. Sementara itu RRI menyiarkan ulangan pengumuman-pengumuman seperti disebutkan di muka.

Situasi tegang itu mencapai puncaknya, untuk kemudian mereda sampai kira-kira pukul 10.15 WIB. Pada waktu itu, 18 Maret 1966 sehabis siaran warta berita, Kepala (Puspenad), Brigjen Ibnu Subroto, lewat RRI Jakarta membacakan Keputusan Presiden No. 5.¹⁶⁾ Pengumuman yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden itu, menjelaskan mengenai tindakan pengamanan yang dilakukan oleh ABRI terhadap 15 orang Menteri Kabinet Dwikora. Para Menteri yang diamankan itu ialah :

1. Dr. Subandrio
2. Dr. Chairul Saleh
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo
4. Sumardjo
5. Oei Tjoe Tat, SH.
6. Ir. Surachman
7. Jusuf Muda Dalam
8. Armunanto
9. Sutomo Martopradoto
10. Astrawinata, SH.

11. Mayjen TNI Achmadi
12. Drs. Moh. Achadi
13. Letkol Inf. Imam Sjafie
14. Tumakaka
15. Mayjen TNI Dr. Sumarno

Pada konsiderans Keppres No. 5 itu disebutkan bahwa sesuai dengan UUD '45 Menteri-menteri hanyalah pembantu belaka dari Presiden. Pemerintahan berada di tangan Presiden. Kedudukan Menteri-menteri tidak dapat dikaitkan dengan kedudukan Presiden. Pengamanan yang dilakukan oleh ABRI terhadap para menteri itu didasarkan atas pertimbangan untuk menghindarkan mereka dari sasaran kemarahan rakyat, sebab mereka terdapat indikasi terlibat dalam "Gerakan 30 September", atau setidaknya diragukan itikad baiknya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden.

Setelah Keppres No. 5 disiarkan lewat RRI, barulah rakyat merasa lega. Mahasiswa, pelajar dan pemuda yang sejak pagi hari stand-by di pos-pos mereka, kembali memenuhi jalan-jalan ibukota dengan menaiki bus-bus dan truck-truck sambil bersorak-sorak menyampaikan pengumuman itu agar diketahui masyarakat secara luas. Ketegangan yang mencekam telah lewat, menjelang tengah hari setelah satuan-satuan ABRI ditarik dari tempat-tempat mereka mengadakan pengawalan. Suasana kembali pulih seperti biasa. Pada hari itu juga Front Pancasila beserta *orpol* dan *ormas* yang tergabung di dalamnya, menyatakan bahwa pengamanan 15 orang menteri adalah tepat, sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Pernyataan itu ditandatangani oleh K.H. Dachlan (NU), Harsono Tjokroaminoto (PSII), I.J. Kasimo (Katolik), Hardi, SH (PNI), A.M. Pasila, SH. (Parkindo).

Cukup lama rakyat menanti penyelesaian politik mengenai PKI yang pernah dijanjikan oleh Presiden Sukarno. Perkembangan situasi terakhir di Indonesia telah mengundang berbagai reaksi berbagai negara. Duta Besar Philipina di Indonesia

mengawatkan kepada pemerintahannya supaya bersikap "wait and see". Pemerintah Malaysia mengambil sikap yang sama. ABRI tidak menunjukkan sikap yang lain terhadap Malaysia seperti yang telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno, demikian kata Tengku Abdul Rachman. Sementara Uni Sovyet menyiarkan SP 11 Maret dan Keputusan pembubaran PKI, tetapi tidak memberi ulasan. Kantor Berita "Ceteka" dari Cechoslovakia mencaci maki dan mengatakan tindakan itu sebagai tindakan kurang ajar.¹⁷⁾

Di Jakarta tanggal 19 Maret diadakan Rapat Raksasa Penyelamatan Revolusi.¹⁸⁾ Rapat yang diadakan di lapangan Banteng mendapat sambutan spontan dari massa ibukota. Pada kesempatan ini telah berbicara tokoh-tokoh partai, mahasiswa serta tokoh-tokoh lain yang menganggap dirinya paling berhak untuk berbicara. Selain memberikan dukungan terhadap pembubaran PKI, dukungan dilontarkan pula tuntutan-tuntutan supaya lembaga-lembaga pemerintah dibersihkan dari orang-orang PKI atau simpatisan-simpatisannya. Tuntutan lain yang dilontarkan supaya Kabinet dirombak dan disempurnakan.

Nada tuntutan yang sama, yaitu supaya lembaga-lembaga pemerintahan dibersihkan dan Kabinet dirombak, terlontar dalam pernyataan DPR-GR dan dukungan dari partai-partai.

Tetapi yang cepat bergerak menanggapi situasi ialah mahasiswa dan pelajar karena memang sudah terlatih selama beberapa bulan untuk hal-hal seperti itu. Beberapa orang Menteri mereka datang, dan dibawa ke KOSTRAD atau markas-markas mahasiswa. Aksi-aksi jalanan kembali muncul di Jakarta. Mahasiswa dan pelajar mendatangi Kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di mana terdapat pejabat-pejabat yang mereka anggap bersimpati dengan PKI. Tindakan itu beralasan, sebab dari tiga tuntutan yang mereka ajukan, yaitu : penurunan harga/perbaikan ekonomi, retooling Kabinet Dwikora dan pembubaran PKI baru satu yang sudah terkabul. Mereka memperjuangkan yang dua buah lagi.

Sementara itu partner mahasiswa yaitu ABRI, tetapi berusaha memperjuangkan dua tuntutan yang masih sisa. Hanya saja caranya berbeda dengan yang dilakukan mahasiswa. Dari Markas KOSTRAD masalah itu terus dipikirkan dan dimatangkan.

Di lingkungan pimpinan angkatan berlangsung serangkaian kegiatan pembubaran PKI beserta ormasnya serta instruksi yang telah dikeluarkan. Angkatan Kepolisian RI dalam rapat Pangdak se-Indonesia yang diadakan pada tanggal 13 Maret menyatakan dukungannya¹⁹⁾ terhadap pengumuman-pengumuman dan instruksi yang telah dikeluarkan. Sedang Men/Pangau dalam instruksinya tanggal 12 Maret memerintahkan supaya Anggota AURI membantu usaha Jenderal Soeharto serta menjaga kekompakan antara ABRI.²⁰⁾

Sebagai kekuatan bersenjata, ABRI masih terikat dengan disiplin dan hierarki. Presiden Sukarno masih tetap PANGTI. Perintah yang diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto menyebutkan pula supaya sipemegang perintah itu menjaga keamanan dan keselamatan pribadi Presiden. Dalam hubungan itu Pangdam V/Jaya tanggal 15 Maret 1966 mengeluarkan pengumuman mengenai Daerah Lingkaran Pengamanan Istana. Daerah itu dinyatakan tertutup untuk umum.²¹⁾

Apa yang dibahas di Markas KOSTRAD tidak selamanya sejalan dengan kehendak Presiden. Presiden Sukarno merasa bahwa sipemegang surat perintah tidak seluruhnya mematuhi isi surat perintah itu. Presiden Sukarno tidak dapat menerima cara-cara yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar ataupun partai-partai dan rakyat pada kesempatan rapat-rapat umum, terutama dalam hal menyerang Menteri-menteri.

Dukungan terhadap Keppres no. 5 dengan cepat diberikan oleh berbagai pihak. DPP PSII dalam rapatnya yang diadakan segera setelah mengetahui hal itu, menyatakan perasaan syukur atas tindakan pengamanan itu. Kepada Presiden selanjutnya diharapkan agar mengambil langkah-langkah normalisasi, yakni menyusun dengan cepat dan bijaksana kabinet yang sesuai

dengan tuntutan rakyat berdasarkan UUD '45.²²⁾ Front Pancasila yang secara resmi dibentuk pada tanggal 4 Mei 1966 dalam rapat kilatnya pada hari yang sama memberikan dukungan dan menyatakan bahwa tindakan Presiden dengan Keppres No. 5 itu sangat tepat.²³⁾ Begitu pula bekas pelajar/pejuang Siliwangi yang bergabung dalam "Tugas Prakarsa Siliwangi" memberikan dukungan serupa. Dalam menganalisa pemerintahan, Tugas Prakarsa Siliwangi menyatakan bahwa sesuatu pemerintahan di mana terdapat unsur-unsur yang tidak dihargai rakyat tidak akan berwibawa.²⁴⁾ Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut gembira tindakan pengamanan itu, walaupun tindakan tersebut menurut PWI belum sepenuhnya berhasil. PWI juga berharap agar di masa-masa datang tindakan-tindakan yang serupa akan sering diadakan.²⁵⁾ Dukungan terhadap Keppres No. 5 itu juga datang dari KATI (Kesatuan Aksi Tani Indonesia), KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) dan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) di Bandung.²⁶⁾

Tindakan pengamanan terhadap para menteri itu pada umumnya berlangsung dengan lancar. Namun demikian masih ada tiga orang Menteri yang berhasil melarikan diri, yaitu :

1. Ir. Surachman
2. Drs. Achadi
3. Letkol Imam Sjafe'ie.

Yang terakhir ini berhasil ditangkap yang berwajib pada tanggal 20 Maret di Bidaracina, Jatinegara. Sedang Drs. Achadi ditangkap di daerah Tebet pada tanggal 3 Mei setelah bersembunyi selama kira-kira satu setengah bulan. Ir. Surachman dipecat oleh partainya (PNI) pada tanggal 4 April dan selanjutnya oleh pimpinan PNI diinstruksikan kepada massanya untuk menangkap Ir. Surachman.²⁷⁾ Walaupun menteri Pos dan Telekomunikasi, Laksamana Udara Surjadarma tidak termasuk dalam daftar para Menteri yang diamankan tetapi tanggal 18 Maret itu juga dibebaskan dari jabatannya. Sesuai dengan Pengumuman Presiden No. 3 tanggal 18 Maret 1966, Letjen Hidayat, ditunjuk

menjabat Menteri Pos dan Telekomunikasi menggantikan Lak-samana Surjadarma.²⁸⁾

Tindakan pengamanan terhadap para menteri telah menyebabkan adanya kekosongan dalam pemerintahan. Untuk mengatasi hal itu serta menjaga agar pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar, sore hari tanggal 18 Maret, Letjen Soeharto mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Kabinet yang tidak dikenakan tindakan pengamanan. Oleh Letjen Soeharto diterangkan dan diberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil sesudah menerima Surat Perintah 11 Maret. Dalam rapat itu telah dibacakan pula Pengumuman No. 3 dan No. 4. Pengumuman No. 3 ialah pengangkatan Letjen Hidajat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi *ad interim* di samping jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Darat. Pengumuman No. 4 menunjuk Waperdam-Waperdam *ad interim* untuk Presidium Kabinet, yaitu :

1. Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX, Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
2. Dr. Roeslan Abdulgani, Waperdam Lembaga-lembaga Politik.
3. Dr. Idham Chalid, Waperdam Bidang Hubungan Lembaga-Lembaga Tertinggi.
4. Dr. J. Leimena, Waperdam Bidang Umum.
5. Adam Malik,²⁹⁾ Waperdam Bidang Sosial-Politik.

Selama itu dalam pengumuman yang sama ditentukan pula Menteri-menteri *ad interim* lainnya untuk mengisi lowongan yang ditinggalkan oleh Menteri-menteri yang telah diamankan.

Setelah berlangsung tindakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri, disusul dengan serangkaian kegiatan untuk menyusun suatu Kabinet yang baru. Berbagai golongan dalam masyarakat memberikan saran-saran dalam bentuk pernyataan-pernyataan tentang kabinet yang akan dibentuk itu. Saran-saran itu pada pokoknya berkisar pada kehendak agar Kabinet yang akan dibentuk itu bersih dari unsur-unsur Gestapu/PKI. Pimpinan

Pusat Muhammadiyah menyarankan agar dibentuk Kabinet dengan perubahan yang struktural. Mengenai persyaratan bagi para calon anggota kabinet, berbagai pihak menginginkan harus berwibawa, berakhlak, patriotik dan ahli dalam bidang masing-masing. KAMI Bandung dalam pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono mengusulkan agar dibentuk satu *national zaken kabinet*. KASI Bandung mengharapkan agar dibentuk kabinet yang bersih dan bermoral Pancasila, sederhana dan mampu serta berani mengabdikan kepentingan rakyat.³⁰⁾

Partai Katolik mendukung pernyataan NU yang pada tanggal 18 Maret telah menyarankan agar Kabinet Dwikora dibubarkan dan dibentuk Kabinet baru yang berwibawa dan ditaati oleh rakyat. Saran Partai Katolik itu sesuai dengan konsepsi yang telah diajukan kepada Presiden pada tanggal 27 Nopember 1965. Selanjutnya diharapkan agar diadakan penataan kembali kehidupan politik kenegaraan dengan berazaskan religius, nasional dan sosial. Kabinet baru yang akan dibentuk itu harus, kompak, kompeten dan sederhana serta berisikan satu "team of economics leadership" dengan tugas utama memperbaiki ekonomi rakyat. Anggota kabinet harus terdiri dari orang-orang ahli.³¹⁾

2. Pembentukan Kabinet "Peralihan"

Sidang Paripurna DPRGR pada penutupan masa sidang ketiga tahun 1965/1966 yang dilangsungkan tanggal 24 Maret 1966, mengusulkan kepada Presiden agar membentuk Kabinet yang bersih dari Gestapu/PKI.³²⁾ Sementara itu golongan Islam di DPRGR mendesak agar dibentuk Kabinet dengan Menteri-menteri yang patriotik dan berakhlak. Yang harus diperhatikan ialah kualitas, bukan kuantitas. KABI menyarankan agar kabinet yang akan dibentuk paling sedikit haruslah bisa memberikan nasi dan celana kepada rakyat.³³⁾

Setelah melalui proses perundingan sejak tanggal 21 Maret, baik antara Presiden dengan para Waperdam dengan ditambah tokoh-tokoh penting lainnya dalam masyarakat, maupun antara para Waperdam *ad interim* itu sendiri. Sebagai hasilnya maka pada tanggal 27 Maret diumumkan susunan Kabinet baru. Kabinet ini tetap

bernama Kabinet Dwikora, tetapi dengan tambahan sebutan "yang disempurnakan lagi". Susunan dan personalia kabinet ini terdiri dari :

1. Dr. J. Leimena, Waperdam Bidang Umum.
2. Dr. KH. Idham Chalid, Waperdam ad interim Bidang Hubungan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.
3. Dr. Ruslan Abdulgani, Waperdam Lembaga-lembaga Politik.
4. Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX, Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
5. Letjen Soeharto, Waperdam ad interim Bidang Pertahanan Keamanan.
6. Adam Malik, Waperdam Bidang Sosial Politik.

Berbeda dengan Kabinet sebelumnya, dalam kabinet ini tidak terdapat jabatan Menteri Koordinator. Tiap-tiap Waperdam pengurus sebuah eselon (bidang). Tiap bidang dibagi atas beberapa kementerian dan dikepalai oleh seorang Menteri. Kementerian dipecah menjadi beberapa departemen yang masing-masing dikepalai oleh seorang Deputy Menteri. Deputy Menteri bertanggung jawab kepada Menteri dan Menteri kepada Waperdam. Dengan pembagian yang demikian maka Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi ini mempunyai 24 Kementerian. Struktur kabinet adalah sebagai berikut :

I. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terdiri dari :

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Keuangan
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja merangkap Koperasi.
4. Kementerian Pertambangan dan Migas.
5. Kementerian Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat.
6. Kementerian Perindustrian Dasar/Ringan.
7. Kementerian Perhubungan.
8. Kementerian Pertanian.
9. Kementerian Pembangunan Proyek-proyek Mandataris.

II. Bidang Pertahanan-Keamanan terdiri dari :

1. Kementerian Angkatan Darat.
2. Kementerian Angkatan Laut.
3. Kementerian Angkatan Udara.
4. Kementerian Angkatan Kepolisian.
5. Kementerian Veteran dan Demobilisasi.
6. Kementerian Kejaksaan.

III. Bidang Sosial dan Politik terdiri dari :

1. Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Luar Negeri.
3. Kementerian Penerangan.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kementerian Agama.
6. Kementerian Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung.
7. Kementerian Sosial.
8. Kementerian Tenaga Kerja (Perburuhan).
9. Kementerian Kesehatan.

Bidang umum, Bidang Lembaga-lembaga Politik dan Bidang hubungan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi tidak mempunyai kementerian-kementerian. Waperdam yang mengepalai bidang-bidang tersebut tidak membawahi kementerian-kementerian, tetapi membawahi lembaga-lembaga tertentu dalam pemerintahan. Waperdam Bidang Umum membawahi Sekretariat Negara, Urusan Pegawai. Lembaga Administrasi Negara dan Dewan Makanan. Waperdam hubungan lembaga-lembaga Negara Tertinggi mengurus MPRS, DPRGR, DPA dan BPK. Waperdam bidang lembaga-lembaga politik mengurus Front Nasional, Up-penas, Lembaga Research Nasional, LPKB dan Lemhanas.

Di samping susunan seperti di muka terdapat pula jabatan menteri-menteri yang tidak memimpin kementerian misalnya Ketua MPRS, Ketua DPRGR dan sebagainya. Begitu pula Waperdam Pangsar KOGAM yang dijabat oleh Jenderal A.H. Nasution, berkedudukan sebagai Menteri.

Kehadiran Kabinet yang baru itu telah menimbulkan reaksi-reaksi dari beberapa partai politik dan ormas-ormasnya. DPP PSII menganggap bahwa Kabinet itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, mengandung kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat kelancaran dan suksesnya Kabinet. PSII menyayangkan pula proses pembentukannya, karena partai-partai politik/golkar tidak diikutsertakan. Begitu pula pemuda pelajar dan mahasiswa tidak dibawa serta. Front Pancasila Pusat meramalkan bahwa kegelisahan akan timbul kembali di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa, sebab Kabinet tidak mencerminkan kehendak rakyat. Komando Strategi Ampera (KOSTRAM) menganggap bahwa susunan dan personalia kabinet tidak sesuai dengan isi dan makna Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966.³⁴⁾ Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) melalui radio Ampera memberikan kritik terhadap beberapa tokoh yang duduk dalam Kabinet, misalnya Dr. Ruslan Abdulgani, Dr. Leimena, David Cheng dan sebagainya. Bahkan sebelum kabinet terbentuk KAMI telah mensinyalir adanya "dagang sapi" dalam penyusunan Kabinet.

Sebelum pernyataan-pernyataan kurang puas seperti di atas keluar, Letjen Soeharto sebagai seorang yang aktif turut serta menyusun Kabinet dalam penjelasan susunan Kabinet mengatakan bahwa Kabinet yang sekarang memang belum sempurna sama sekali. Ia baru merupakan tahap pertama dari kemenangan-kemenangan yang akan menyusul kemudian. Kabinet ini adalah hasil maksimum dari kemenangan yang dapat dicapai pada waktu pembentukannya itu.

Susunan dan personalian kabinet yang diumumkan pada tanggal 27 Maret, dilantik pada tanggal 30 Maret. Sampai saat pelantikan, jabatan Menteri Panglima Angkatan Udara masih lowong. Baru pada tanggal 31 Maret dengan Keppres No. 69, Komodor Udara Rusmin Nurjadin diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara. Dalam pidato pelantikan Menteri-menteri baru tanggal 30 Maret itu Presiden Sukarno mengakui bahwa kabinet ini belum sempurna dan bila perlu akan disempurnakan lagi. Dalam pidato yang sama Presiden telah

mengecam pernyataan PSII mengenai kabinet dan meminta partai ini memberikan susunan kabinet menurut gagasannya. Tanggapan pihak ABRI terhadap kabinet ini sebagai berikut :

1. Struktur Kabinet harus sederhana, riil/rasionil, mudah dikendalikan tidak bersimpang siur, tegas, tugas masing-masing efisien dan efektif serta mampu melaksanakan programnya.
2. Menteri-menteri harus jujur, cakap, kompak, dipercaya oleh rakyat, revolusioner, Pancasilais, sejati dan bukan antek-antek PKI/Gestapu atau petualang plintat-plintut.
3. Program Kabinet harus mampu mengusahakan dan mewujudkan dalam waktu singkat kesejahteraan rakyat, terutama sandang-pangan. Di samping itu harus pula berani menggangyang segala bentuk kontra revolusi dan penyelewengan serta sejauh mungkin kemampuan dan kekuatan tetap meneruskan konfrontasi terhadap "Malaysia/Nekolim" dan penyelenggaraan Konefo".³⁵⁾

Tanggapan ABRI ini diberikan oleh Letjen Soeharto dalam pidatonya segera setelah kabinet terbentuk. Dalam pidatonya diminta agar rakyat memberikan kesempatan kepada kabinet untuk bekerja. Ucapan Letjen Soeharto ini disokong oleh Men/Pangak serta beberapa partai politik/ormas-ormasnya.

Pada saat inilah sejarah tanah air kita memasuki masa peralihan Era Orde Baru.

3. Peningkatan SP 11 Maret Menjadi Ketetapan No. IX Tahun 1966 MPRS

Oleh Letnan Jenderal Soeharto Perintah 11 Maret itu, beliau gunakan untuk menegaskan kembali prinsip kehidupan konstitusional, dan menumbuhkan kehidupan demokrasi serta menegaskan hukum yang pada waktu itu sudah diabaikan. Tindakan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Soeharto itu adalah sesuai dengan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, bukan saja dikuatkan berdasarkan langkah-langkah yang demokratis dan

konstitusional tetapi sekaligus merintis jalan yang baik bagi generasi yang akan datang dan dapat mempertanggung-jawabkan kepada sejarah.³⁶⁾

Untuk mendapatkan landasan-landasan yuridis dan konstitusional Letnan Jenderal Soeharto meminta kepada Sidang Umum ke IV MPRS tanggal 11 Juni 1966 untuk mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret serta tindakan yang telah dilakukan sehubungan dengan SP 11 Maret itu. Dalam sidang yang membicarakan Surat Perintah 11 Maret, maka sidang berpendapat bahwa SP 11 Maret itu perlu diperkuat dengan suatu ketetapan MPRS, karena tindakan-tindakan yang diambil oleh Letnan Jenderal Soeharto dinilai positif. Pengukuhanannya melalui Ketetapan MPRS adalah Ketetapan No. IX/MPRS/1966 yang mengandung penjelasan sebagai berikut :

1. Menerima baik dan memperkuat kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS yang dituangkan dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Jenderal Soeharto dan meningkatkannya sebagai ketetapan MPRS.

2. Surat Perintah 11 Maret tersebut mempunyai daya laku sampai terbentuknya MPR hasil pemilihan umum.

3. Mempercayakan kepada Letnan Jenderal Soeharto peme-gang Surat Ketetapan MPRS untuk memikul tanggung-jawab wewe-nang yang terkandung di dalamnya dengan penuh kebijaksanaan. Ketetapan MPRS yang diberikan kepada Letnan Jenderal Soeharto ini ditanda tangani oleh Ketua Pelaksana Harian MPRS Mayor Jenderal Wilujo Poespojudjo, serta wakilnya Osa Maliki dan H.M. Subchan Z.E.

Menanggapi pengukuhan Surat Perintah 11 Maret oleh MPRS itu Letnan Jenderal Soeharto menyatakan : "bahwa sebagai pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, dengan segala kesungguhan dan bersama-sama rakyat saya berketetapan hati untuk mengamankan semua keputusan-keputusan MPRS".³⁷⁾

Selanjutnya pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden selaku Mandataris MPRS diminta untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijaksanaan yang telah dilaksanakan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G.30.S/PKI. Pidato pertanggungjawabannya Presiden mengecewakan MPRS, karena dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS ternyata cenderung kepada memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Presiden menamai pidatonya itu dengan Nawaksara artinya sembilan pokok masalah. Masalah Nasional, masalah-masalah yang pokok saja yang disinggung. Khusus masalah G.30.S/PKI, sama sekali tidak disebut dalam pidato itu. Karena masalah Gerakan 30 September/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijaksanaan presiden tidak pernah disinggung dalam Nawaksara, maka Pimpinan MPRS menganggap bahwa Presiden ternyata tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan kelengkapan laporan pertanggungjawabannya sebagai mandataris MPRS. Untuk itu kemudian pimpinan MPRS mengirimkan nota kepada Presiden agar Presiden melengkapi pertanggungjawabannya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G.30.S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.³⁸⁾ Nota itu dikirim oleh pimpinan MPRS pada tanggal 22 Oktober 1966. Permintaan pimpinan MPRS itu dipenuhi oleh Presiden. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan naskah yang dimaksud untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya Nawaksara, yang disebut Pelengkap Nawaksara atau disingkat Pel Nawaksara.³⁹⁾

Diterimanya Pel Nawaksara oleh MPRS tidak meredakan situasi malahan situasi konflik semakin menjadi gawat. Pel Nawaksara mendapat tanggapan dari seluruh rakyat, dengan pendapat bahwa Presiden Sukarno berusaha untuk menambah gawatnya situasi politik. Dewan pimpinan Daerah PNI Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Pel Nawaksara bukan saja menambah gawatnya keadaan, bahkan cenderung untuk mengarah kepada timbulnya malapetaka nasional

yang baru. PNI Sulawesi Selatan merasa kecewa terhadap Pel Nawaksara sebagai pertanggung jawab Presiden/Mandataris MPRS karena tidak memenuhi isi dan jiwa Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966 dan tidak pula memberikan penyelesaian terhadap konflik situasi yang berlangsung selama ini.⁴⁰⁾ Demikian juga DPRD Sulawesi Selatan menyatakan menolak Pel Nawaksara karena dianggap tidak memenuhi Trihanura.⁴¹⁾ Para alim-ulama Jawa Barat dalam ikrarnya di hadapan Ketua DPRGR Jawa Barat menyatakan tidak lagi mengakui Presiden Sukarno sebagai Presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam dan Undang-Undang Dasar '45 serta Ketetapan MPRS.⁴³⁾

CATATAN BAB III

- 1) *Kompas*, 13 Maret 1966
- 2) Periksa Lampiran 2.
- 3) *Angkatan Bersenjata*, 14 Maret 1966.
- 4) *Angkatan Bersenjata*, 14 Maret 1966.
- 5) *Angkatan Bersenjata*, 14 Maret 1966.
- 6) Wawancara dengan Jenderal Amir Machmud, Jakarta, 14 April 1983.
- 7) Wawancara dengan Bapak Amir Machmud, Jakarta, 14 April 1983.
- 8) *Berita Yudha*, 18 Maret 1966.
- 9) *Berita Yudha*, 17 Maret 1966.
- 10) *Berita Yudha*, 17 Maret 1966.
- 11) *Berita Yudha*, 17 Maret 1966.
- 12) *Berita Yudha*, 18 Maret 1966.
- 13) Press Realese Puspen AD, tanggal 18 Maret 1966, *Berita Yudha*, tanggal 18 Maret 1966.

- 14) Press Realese Puspen AD, 002/Sus, tanggal 18 Maret 1966;
Berita Yudha, tanggal 18 Maret 1966.
- 15) *Kompas*, 19 Maret 1966.
- 16) Press Realese Puspen AD, 003/Sus, tanggal 18 Maret 1964;
Berita Yudha, tanggal 18 Maret 1966.
- 17) *Berita Yudha*, tanggal 19 Maret 1966.
- 18) *Berita Yudha*, tanggal 16 Maret 1966.
- 19) *Berita Yudha*, tgl. 16 Maret 1966
- 20) *Berita Yudha*, 15 Maret 1966
- 21) *Berita Yudha*, 16 Maret 1966
- 22) *Berita Yudha*, 15 Maret 1966
- 23) *Berita Yudha*, 16 Maret 1966
- 24) *Berita Yudha*, 15 Maret 1966
- 22) *Berita Yudha*, 15 Maret 1966
- 23) *Berita Yudha*, 16 Maret 1966
- 24) *Berita Yudha*, 19 Maret 1966
- 25) *Berita Yudha*, 22 Maret 1966
- 26) *Berita Yudha*, 19 Maret 1966
- 27) Press Release Puspen AD, tgl. 8 Maret 1966
- 28) *Berita Yudha*, 19 Maret 1966
- 29) *Berita Yudha*, 19 Maret 1966
- 30) *Berita Yudha*, tgl. 22 Maret 1966
- 31) *Berita Yudha*, tgl. 23 Maret 1966
- 30) *Berita Yudha*, tgl. 25 Maret 1966; *Angkatan Bersendjata*,
tanggal 25 Maret 1966
- 33) *Angkatan Bersendjata*, tgl. 25 Maret 1966
- 34) *Angkatan Bersendjata*, 29 Maret 1966, hal. 1
Berita Yudha, tgl. 28 Maret 1966, hal. 1 dan 3.
- 35) *Angkatan Bersendjata*, tgl. 29 Maret 1966, hal. 1, 2 dan 3.
- 36) "Presiden jawab pertanyaan-2 Sekitar Surat Perintah 11
Maret", *Suara Karya*, 11 Maret 1971.
- 37) *Keputusan-2 MPRS*, Sidang Umum ke IV th. 1966,
hal. 11.

- ³⁸⁾ Jenderal A.H. Nasution, *op.cit.*, hal. 169.
- ³⁹⁾ Lebih lanjut Pelengkap Nawaksara.
- ⁴⁰⁾ *Berita Yudha*, tgl. 21 Maret 1967
- ⁴¹⁾ *Berita Yudha*, tgl. 21 Maret 1967
- ⁴²⁾ *Berita Yudha*, tgl. 21 Maret 1967
- ⁴³⁾ *Berita Yudha*, tgl. 28 Maret 1967

P E R N Y A T A A N.

Setelah menanggapi pidato PJM Presiden/Pangti ABRI/PBR tanggal 15 Djanuari 1966 di Bogor dan mendengar Pernyataan Men Pangad tgl. 16 Djanuari 1966 dengan ini Pimpinan menegaskan sebagai berikut :

1. ABRI selalu taat kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR Bung Karno dalam menghadapi semua tantangan revolusi seusai dengan Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit;
2. ABRI tetap memelihara kekompakan antar ABRI dan kekompakan antar Rakjat dan ABRI sebagai sjarat suksesnja revolusi dan chususnja pengamanan revolusi;
3. Supaja setiap anggauta/petugas ABRI tetap melaksanakan dan terus mengamalkan.

Djakarta, 16 Djanuari 1966
Menko Hankam/KASAB/Wapangsar.-

Menpangad,
ttd,

(Soeharto)

Letnan Djen. TNI.

Men Pangal
ttd,

(R.E. Martadinata)

Laksamana Madya (L).

Men Pangau
ttd,

(Sri Muljono Herlambang)

Laksamana Muda - Udara.

Men Pangak
ttd,

(Sutjipto Judodihardjo)

Inspektur - Djenderal Pol

SUSUNAN KABINET JANG DiSEMPURNAKAN

1. Waperdam I : Dr. Soebandrio.
2. Waperdam II : Dr. J. Keimena.
3. Waperdam III : Dr. Chairael Saleh.
4. Waperdam IV : Dr. H. Idham Chalid.
5. Menteri Penerangan di-
taruh langsung di bawah
Presidium : Majdjen. Achmadi.
Kementerian Luar Ne-
geri dan Hubungan Eko-
nomi LN : Menko Dr. Soebandrio.
Menteri Luar Negeri dan
Hubungan Ekonomi
Luar Negeri : Dr. Soebandrio.
6. Kementerian Hukum
dan Dalam Negeri : Menko Sartono SH.
7. Menteri Dalam Negeri : Majdjen. Dr. Soemarno Sostro-
atmodjo.
9. Menteri Ketua Mahkamah
Agung : Wirjono Prodjodikoro SH.
10. Menteri Djaksa Agung : Brigdjen. Soethardjo.
11. Kompartimen Pertahanan
(SAB dihapuskan) : Menko Majdjen. H. Sarbini.
12. Wk. Menko Pertahanan : Majdjen. Mursid.
13. Menteri Pangad : Letdjen. Soeharto.
14. Menteri Pangal : Laksamana Muda (L) Muljadi.
15. Wk. Menteri Pangal : Majdjen. Hartono.
16. Menteri Pangau : Laksamana Muda (U) Srimul-
jono Herlambang.
17. Menteri Pangak : Komdjen. POL Soetjipto Joe-
didihardjo.
18. Kompartien Keuangan : Menko Dr. Soeharto.

19. Menteri UBS/Gubernur B.I. : Jusuf Muda Dalam.
20. Pembantu Menteri UBS/Gubernur B.I. : Arifin Harahap SH.
21. Pembantu Menteri UBS/Gubernur B.I. : H. Mohd. Hassan.
22. Menteri Urusan Anggaran Negara : Drs. Surjadi.
23. Menteri Iuran Negara : Brigdjén. Drs. Hugeng Iman-Santoso.
24. Menteri Peransurashian : Sutjipto Amidarmo.
25. Menteri Urs. Penertiban Bank dan Modal Swasta/Gubernur Pengganti I Bank Indonesia : J.D. Massie.
26. Kompartimen Pembangunan : Menko Sultan Hamengkubuwono IX.
27. Menteri Urusan Research Nasional : Soehadi Reksowardojo.
28. Menteri Urusan Research Nasional : Soehadi Reksowardojo.
29. Menteri Urusan Minjak dan Gas Bumi : Majdjén. Dr. Ibnu Sutowo.
30. Menteri Pertambangan : Armunanto.
31. Menteri Perindustrian Dasar : Brigdjén. Mohd. Jusuf.
32. Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi : Majdjén. Basoeeki Rachmat.
33. Menteri Pariwisata : Sln. Hamengkubuwono IX.
34. Kompartemen Perindustrian Rakjat : Chairul Saleh.
35. Menteri Perindustrian Tekstil : Brigdjén. Azhari.

36. Menteri Perindustrian Ringan : Laksamana Muda Udara Suharnoko.
37. Menteri Perindustrian Keradjinan : Hadi Thajeb.
38. Menteri Negara diperbantukan Menko Perindustrian Rakjat untuk Berdikari : T.D. Pardede.
39. Kompartimen P.U.T. : Menko Ir. Soetami.
(merangkap kopronef)
40. Menteri Listrik dan Ketenagaan : Ir. Setiadi.
41. Menteri Pengairan Dasar : Ir.P.C. Harjasudirdja.
42. Menteri Bina Marga : Brigdjen. Hartawan.
43. Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi : David Cheng.
44. Menteri Drs. Djalan Raja Sumatera : Ir. Bratanata.
45. Kompartimen Pertanian dan Agraria : Menko Sadjarwo SH.
46. Menteri Pertanian : Ir. Soekarno.
47. Menteri Perkebunan : Drs. Frans Seda.
48. Menteri Kehutanan : Sudjarwo.
49. Menteri Agraria : R. Hermanses SH.
50. Menteri Pengairan Rakjat dan PMD : Ir. Soerachman.
51. Kompartimen Distribusi : Menko Dr. J. Leimena.
52. Menteri Perdagangan : Brigdjen. A. Jusuf.
53. Menteri Perhubungan Darat : Letdjen. Hidajat.
54. Menteri Pos dan Telekomunikasi : Laksamana Udara S. Surjardarma.
55. Menteri Perhubungan Udara : Partono.

56. Menteri Transmigrasi dan Koperasi : Drs. Mohd. Achadi.
57. Kompartimen Maritim : Menko Majdjen. Ali Sadikin.
58. Menteri Perhubungan Laut : Laksamana Muda (L) Hamzah Atmohandojo.
60. Menteri Perindustrian Maritim : Mardanus.
61. Kompartimen Kesyah-
teraan : Menko Muljadi Djojomartono.
62. Menteri Sosial : Nj. Ruslan Sardjono SH.
63. Menteri Kesehatan : Majdjen. Prof. Dr. Satrio.
64. Kompartimen Urusan Agama : Menko Prof. K.H. Sjaifuddin zuhri.
65. Menteri Agama : Prof. K.H. Sjaifuddin Zuhri.
66. Menteri Urusan Hadji : Prof. K.H. Farid Ma'ruf.
67. Menteri Urusan Penghu-
bung Pemerintahan de-
ngan Alim Ulama : Marzuki Jatim.
68. Menteri Negara diper-
bantukan Menko Agama : K.H. Fatah Jasin.
69. Kompartimen Pendidik-
an dan Kebudayaan : Menko Prof. Prijono.
70. Menteri PDK : Soemardjo.
- Menteri PTIP a.i. : Dr. J. Leimena.
71. Menteri Olah Raga : M a l a d i.
72. Kompartimen Perhubung-
an dengan Rakjat : Menko Dr. H. Roeslan Abdoel-
gani.
73. Menteri Penghubung DPR-
GR, MPRS, DPA-Front
Nasional : Domine J. Rumambi.
74. Menteri Sekdjen Front
Nasional : Tumakaka.

- Menteri-2 Negara jang diperbantukan :
75. Menteri Penasehat Presiden Urusan Fund and Forces : Notohamiprodjo.
 76. Menteri Penasehat Presiden Urs. Keamanan Dlm Negeri : Djenderal Polisi Soekarnodjojonegoro.
 77. Menteri Negara diperbantukan pada Presiden : Moenadjad SH.
 78. Menteri Negara diperbantukan pada Presiden khusus Urusan Keamanan : M. Sjafei.
 79. Menteri Negara diperbantukan pada Presidium : Oei Tjoe Tat SH.
 80. Menteri sda : Brigdjen. Drs. A. Soekendro.
 81. Menteri sda : H. Aminoeddin Azis.
 82. Menteri sda : Soedibjo.
 83. Menteri sda : Brigdjen. Moedjoko.
- Pedjabat2 jang berkedudukan Wakil Perdana Menteri :
- Ketua MPRS : Dr. Chairael Saleh.
- Pedjabat2 jang berkedudukan Menko :
84. Menko Wk. Ketua MPRS : Ali Sastroamidjojo SH.
 - " " " " : Dr. K.H. Idham Chalid.
 85. " " " " : Majdjen. Puspojudo.
 86. Menko Ketua DPR-GR : I. Gusti Soebamia.
 87. Menko Wk. Ketua I DPA : Sartono SH.

88. Menko Keiua Pimpinan
Badan Pemeriksa Ke-
uangan : Majdjen. Soeprajogi.
89. Menko Upenas : Soemarno SH.
90. Menko diperbantukan
pada Presiden Urusan
Hubungan Ekonomi
Luar Negeri : Adam Malik.
Pedjabat2 jang berkedu-
dukan Menteri :
91. Sekretaris Negara : Mohd. Ichsan SH.
— Ketua Lembaga Pertahan-
an Nasional : Majdjen. Wilujo Puspojudo.
92. Direktorat Djenderal Badan
Tenaga Atom Nasional : Prof.Dr. G.A. Siwabessy.
93. Wk. Ketua DPR-GR : Dr. Sarif Thajeb.
94. „ „ „ : Laksamana Muda (L).
Murssalin.
95. „ „ „ : H.A. Sjaichu.
96. „ „ „ : Asmara Hadi.
97. Wk. Ketua-II DPA : Prof. Soedjonohadinoto SH.
98. Pemeriksa Keuangan
Agung Muda : Soekardan SH.
99. sda : H.A. Pandelaki.
100. sda : Muchtar Usman SH.
101. sda : Drs. Radius.
102. Panglima Kopelapip : Laksamana Udara Omar Dani.
103. Wkl. : Kurwet Kartadiredja.
104. Gubernur Kepala Daerah : Majdjen. Dr. Soemarno.
Chusus Ibukota Djakarta : Sosroatmodjo.
105. Penasehat Presiden Urs.
Kepolisian : Komdjennpol. Soemarto.
Dapat ditambahkan
Menteri2 baru tersebut
akan dilantik pada hari
Kamis jad.

PERINTAH HARIAN

Para Tamtama, Bintara dan Perwira TNI/Angkatan Darat
chususnja serta Angkatan Bersendjata pada umumnja;

Rakjat Indonesia jang sangat saja tjintai,

1. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden/Panglima Tertinggi/
Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS Bung Karno
jang kita tjintai telah memerintahkan kepada saja, untuk
atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar
Revolusi/Mandataris MPRS mengambil segala tindakan
jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan pribadi
dan kewibawaan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/
Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk
keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan me-
laksanakan dengan pasti segala adjaran Presiden Pemimpin
Besar Revolusi;
2. Sungguh suatu tugas dan tanggung djawab jang sangat berat
tetapi penuh kehormatan jang pada hakekatnja bukan se-
kedar bagi saja pribadi, melainkan bagi Angkatan Ber-
sendjata dan seluruh Rakjat Indonesia;
3. Bagi Rakjat, hal ini berarti bahwa suara hati nurani Rakjat
jang selama ini dituangkan dalam perdjjuangan jang penuh
keichlasan, kedjudjuran, heroisme dan selalu penuh tawakal
kepada Tuhan Jang Maha Esa, benar2 dilihat, didengar dan
diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno
jang sangat kita tjintai dan jang djuga merupakan bukti ke-
tjintaan Pemimpin Besar Revolusi kepada kita semua;
4. Setiap bantuan, dukungan dan ikut-sertanja Rakjat dalam
membantu saja hendaknja dilakukan dengan tertib dan tidak
bertindak sendiri2, setiap gerakan dan tindakan dalam
rangka bantuan terhadap tugas-tugas ABRI hendaknja tetap
terpimpin dan terkendali, setiap keinginan dan hasrat
hendaknja disalurkan dalam rangka Demokrasi Terpimpin;

5. Pertjajakan tugas-tugas tersebut kepada ABRI sanak kandungmu. Insja Allah ABRI akan melaksanakan Amanatmu, Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu melaksanakan Revolusi kiri kerakjatan Indonesia, dengan tjiri-tjiri anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan mewujudkan masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantjasila, masjarakat Sosialisme Indonesia, jang diridoi oleh Tuhan Jang Maha Esa dalam taman sari-Nya satu Dunia Baru tanpa segala bantuan penindasan dan penghisapan;
6. ABRI tidak boleh mengkanankan Revolusi Indonesia seperti jang dituduhkan oleh benalu-benalu dan tjetjunguk-tjetjunguk Revolusi; ABRI djuga tidak akan membiarkan Revolusinja dibawa kekiri-kirian, sebab Revolusi kita memang sudah kiri.

Siapa sadja golongan mana sadja, jang akan menjelewengkan garis Revolusi mereka akan berhadapan dengan ABRI, dan akan ditindas oleh ABRI;

7. Para Tamtama, Bintara dan Perwira,
Marilah kita melaksanakan bersama tugas jang dipertjajakan kepada saja, jang berarti djuga tugas jang dipertjajakan kepadamu, dengan penuh rasa tanggungjawab demi Revolusi Rakjat, dari mana kita dilahirkan, oleh siapa kita dibesarkan, untuk siapa kita mengabdikan untuk siapa pula kita rela untuk mati;
8. Perdjalanannya kita masih djauh, perdjjuangan kita belum selesai. Badjakan semangatmu, pertebal imanmu dan tertinggi pengabdianmu kepada Rakjat. Sungguh tugas ini udjian berat bagimu, dan Rakjat akan menilai pengabdianmu.;
9. Dengan segala kerendahan hati, kita pendjatkan permohonan kehadiran Tuhan Jang Maha Esa semoga meridloi

pengabdian kita bersama kepada Tuhan atau kepada Tanah Air, Bangsa dan Revolusi;

10. S e l e s a i.-

Djakarta, 12 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS

atas nama beliau,

(S O E H A R T O)

LETNAN DJENDERAL - T.N.I.

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
MANDATARIS MPRS/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI**

No. : 1/3/1966

- MENIMBANG** :
1. Bahwa pada waktu-waktu jang achir makin terasa kembali aksi-aksi gelap dilakukan oleh sisa-sisa kekuatan kontra-revolusi "Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
 2. Bahwa aksi-aksi gelap itu berupa penjebaran fitnah hasutan, desas-desus, adu domba dan usaha penjusunan kekuatan bersendjata jang mengakibatkan terganggunja kembali keamanan Rakjat dan ktertiban;
 3. Bahwa aksi-aksi gelap tersebut njata2 membahajakan djalannja Revolusi pada umumnja dan mengganggu penjelesaian tingkat Revolusi, dewasa ini, chususnja penanggulangan kesulitan ekonomi dan pengganjangan projek Nekolim Malaysia;
 4. Bahwa demi tetap terkonsolidasi-nja persatuan dan kesatuan sege-nap kekuatan progresip-revolusioner Rakjat Indonesia dan demi pengamanan djalannja Revolusi Indonesia jang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan me-

nudju terwujudnja Masjarakat adil Makmur berdasarkan Pantjasila, Masjarakat sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan tjepat, tepat, dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;

MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh2 "Gerakan 30 September"/Partai Komunis Indonesia;

MENGINGAT : Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tanggal 11 Maret 1966.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Dengan tetap berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA;

PERTAMA : Membubarkan Partai Komunis Indone-

PERTAMA : Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian Organisasi dari tingkat Pusat sampai ke daerah beserta semua Organisasi jang seazas/bernaung dibawahnja;

KEDUA : Menjatakan Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi jang terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari
ditetapkan.-

Ditetapkan di : DJAKARTA
Pada tanggal : 12 Maret 1966

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/MANDA-
TARIS MPRS / PEMIMPIN BESAR REVOLUSI.**

atas nama beliau,

ttd.,

S O E H A R T O.

LETNAN DJENDERAL TNI.-

**SALINAN :
PENGUMUMAN
No. 5**

1. Bahwasanja kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 (pasal 4) berada di tangan Presiden Republik Indonesia;
2. Bahwasanja berdasarkan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 Presiden Republik Indonesia Bung Karno adalah Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;
3. Bahwasanja Menteri-menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah semata-mata hanja pembantu belaka daripada Presiden, dan tidak merupakan bentuk kolektif Pemerintahan, jang Pemerintahan itu berdasarkan pasal 4 Undang-undang Dasar 1945 adalah hanja berada ditangan Presiden;
4. Bahwasanja diantara Menteri-menteri jang kini sedang mendjabat, ada jang merupakan sasaran tuntutan Rakjat, karena penglihatan Rakjat mengenai adaja indikasi tersangkutnja dalam rangkaian kedjadian "Gerakan 30 September" atau setidaknya-tidaknja diragu-ragukan akan itikad-baiknja dalam membantu Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;
5. Bahwasanja "Gerakan 30 September" baik berdasarkan pernyataan dalam Keputusan Presiden No. 370 tahun 1965, maupun berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dan Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa serta penilaian sendiri, adalah merupakan petualangan kontra-revolusi;
6. Bahwasanja tuntutan Rakjat kepada Menteri-menteri itu harus dihindarkan dari kemungkinan penunggangannya oleh kaum kontra-revolusi, gerilija-politik antek-antek "Gerakan 30 September" dan Nekolim;

7. Bahwasanja oleh karena itu, tuntutan Rakjat jang diarahkan kepada Menteri-menteri jang bersangkutan perlu disalurkan dan harus dibatasi dalam proporsi jang sebenarnya dan seharusnya, untuk tidak dikaitkan dengan kedudukan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk pengamanan penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945, jang berada di tangan Presiden, kedudukan Menteri-menteri jang mendjadi sasaran tuntutan Rakjat tadi harus dipisahkan pengkaitannja dari kedudukan Presiden.

Maka demi pengamanan penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 berhubung dengan pasal 17, serta untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan, kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, terdjaminnja keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi, maka Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, dengan kesungguhan hati dan panggilan rasa tanggung jawabnja harus meanmpung suara hati-nurani Rakjat jang dikemukakan dengan serta-merta dan djuga diadjukan setjara tertulis jang hakekkatnja mentjerminkan permufakatan pendapat, telah terpaksa harus melakukan tindakan pengamanan, dengan maksud agar supaja menteri-menteri jang dimaksud djustru djangan sampai mendjadi korban sasaran kemarahan Rakjat jang terkendali dan djangan pula tuntutan hati Rakjat itu terlepas daripada iktikad-baiknya.

Tindakan pengamanan itu dilakukan terhadap :

1. Dr. Soebandrio;
2. Dr. Chairul Saleh;
3. Ir. Setiadi Reksoprodjo;

4. S u m a r d j o;
5. Oei Tjoe Tat, SH;
6. Ir. Surachman;
7. Jusuf Muda Dalam;
8. Armunanto;
9. Sutomo Martopradoto;
10. Astawinata, SH;
11. Maj.Djen. TNI Achmadi;
12. Drs. Mohd. Ahadi;
13. Let.Kol. Inf. Imam Sjafe-ie;
- 14; K; Tumakaka;
15. Maj. Djen. TNI Dr. Sumarno;

Demikian tindakan jang telah diambil dan pertanggungan djawabnja kepada Rakjat. Hendaknja Rakjat mengetahui, memahami dan tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri.

Djakarta, 18 Maret 1966

**PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BER-
SENDJATA REPULBIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI,
atas nama beliau,**

S O E H A R T O

LETNAN DJENDERAL – TNI

**SUSUNAN KABINET DWIKORA JANG
TELAH DSEMPURNAKAN LAGI
27 - 3 - 1966**

6 (enam) orang Waperdam sebagai Kabinet Inti/Presidium :

1. Dr. J. Leimena (Waperdam sbg. Ketua Presidium dan bidang umum);
2. Dr. K.H. Idham Chalid (Waperdam di bidang Hubungan dengan Lembaga-lembaga Tertinggi);
3. Dr. Roeslan Abdulgani (Waperdam untuk bidang Lembaga-lembaga Politik);
4. Sri Sultan Hamengkubuwono (Waperdam untuk bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan);
5. Letnan Djenderal Soeharto (Waperdam untuk bidang Pertahanan dan Keamanan);
6. Adam Malik (Waperdam untuk bidang Sosial Politik);

Tiap-tiap Waperdam, terutama Waperdam-waperdam dibidang Ekonomi Keuangan, Pembangunan dan Pertahanan & Keamanan serta bidang Sosial Politik mempunyai beberapa Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri.

Adapun Kementerian itu adalah :

Waperdam bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan membawahi 9 Kementerian masing-masing :

1. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Brig. Djen. D. Ashari;
2. Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Sumarno S.H.;
3. Kementerian PU & T merangkap Kopronef Menterinja : Ir. Sutami;
4. Kementerian Pertambangan dan Minyak & Gas Bumi Menteri Maj. Djend. Ibnu Sutowo;

5. Kementerian Perindustrian Dasar & Ringan Menterinja Brig. Djend. M. Jusuf;
6. Kementerian Perindustrian Tekstil & Kerajinan Rakjat Menterinja Hadi Thajeb;
7. Kementerian Pertanian Menterinja Drs. Frans Seda;
8. Kementerian Perhubungan Menterinja Laks. Muda Laut Jatidjan;
9. Kementerian Projek-projek Mandatatis Menterinja Laks. Muda Udara Makki Perdana Kusuma.

Waperdam bidang Pertahanan dan Keamanan membawahi 6 Kementerian, masing-masing :

1. Kementerian Angkatan Darat Menterinja : Menteri/Pangad Let. Djend. Suharto;
2. Kementerian Angkatan Laut : Menterinja Laks. Muda Laut Mulajadi;
3. Kementerian Angkatan Udara : akan ditetapkan kemudian (sekarang) Laks. Muda Udara Rusmin Nurjadin;
4. Kementerian Angkatan Kepolisian : Menterinja Kom. Djend. Pol. Sutjipto Judodihardjo;
5. Kementerian Urusan Veteran dan Demobilisasi : Menterinja Major Djenderal Sarbini;
6. Kementerian Kedjaksaan : Menterinja Brig. Djend. Sugiharto.

Tjatatatan : Major Djenderal KKO Hartono tetap sebagai wakil menteri/Pangal dengan kedudukan Menteri.

Waperdam bidang Sosial Politik membawahi 9 Kementerian masing-masing :

1. Kementerian Dalam Negeri : Menterinja Maj.Djend. Basuki Rachmat;
2. Kementerian Luar Negeri : dirangkap oleh Waperdam Adam Malik;
3. Kementerian Penerangan : Menterinja D. Rumambi;
4. Kementerian P.D. dan K. : Menterinja Sarino;
5. Kementerian Agama : K.H. Sjarifuddin Zuhry;

6. Kementerian Sosial : Menterinja Muljadi Djojomartono;
7. Kementerian Kehakiman : Menterinja Prof. Oemar Sentadji S.H.;
8. Kementerian Tenaga Kerdja (dulu) Perburuan : Menterinja Kombes. Pol. Drs. Awaluddin Mch.;
9. Kementerian Kesehatan : Menterinja Maj. Djend. Dr. Satrio;

Tjatatan : kepada Menteri Sosial diperbantukan Nj. Rusiah Sardjono S.H. dengan kedudukan sebagai Deputy Menteri. Waperdam bidang Umum : membawahi Sekretariat Negara, dan Dewan Bahan Makanan.

Waperdam bidang Lembaga-lembaga Politik meliputi : mengatur pekerdjaan lembaga-lembaga Politik Front Nasional, Lembaga Research Nasional. Uppenas, Lembaga Tenaga Atom, Lembaga Pembina Djiwa Revolusi/LPKB, dan Lembaga Pertahanan Nasional/Lemhannas.

Kementerian-kementerian tersebut di atas adalah terdiri dari Departemen-departemen dan masing-masing dikepalai oleh seorang Deputy Menteri.

P E R N Y A T A A N ANGKATAN PERSENJATAAN REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, setelah memahami dengan seksama perkembangan keadaan, jang mengendjawantahkan suara hati nurani rakjat, dengan chidmat menanggapi dengan pernjataan sebagai berikut:

1. Angkatan Bersendjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia, dengan tiga kerangka tudjuannja jang hendak ditjapai, berdasarkan Pantja Sila;

2. Angkatan Bersendjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman kewibawaan Presiden, Bung Karno, beserta adjarannja-2 jang dengan iktikad baik, sebagai anak kandung revolusi, berani dan djudjur dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada pimpinan revolusi Indonesia, untuk mentjegah baik sekarang maupun nanti dalam mengambil keputusan dan kebidjaksanaan jang kurang tepat karena tidak mengendjawantahkan suara hati nurani rakjat;

3. Dengan hubungan itu, Angkatan Bersendjata seperti jang mendjadi niat iktikad Presiden Bung Karno sendiri, djuga mendjadi hasrat hati nurani rakjat hendak menempatkan kedudukan Presiden jang sebenarnja, menurut kemurnian azas dan sendi pelaksanaan daripada UUD '45;

4. Untuk pemurnian pelaksanaan jang berazas dan ber-sendikan kepada Undang2 Dasar 1945, sebagai pengendjawan-tahan suara hati nurani rakjat, Angkatan Bersendjata mendukung kebidjaksanaan Presiden Bung Karno mengenai :

a). rentjana ditetapkannja Undang2 Pemilihan Umum, ber-dasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1), berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 45;

b). rentjana ditetapkan Undang2 susunan Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 16 ayat (1) berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 45;

c). rentjana ditetapkannya susunan sementara Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung untuk pengisian kehampaan akibat petualangan kontra-revolusi Gerakan 30 September/PKI, berdasarkan musjawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

d). penempatan menurut kemurniannya pelaksanaan jang berazaskan dan bersendikan kepada Undang2 Dasar 1945, daripada fungsi :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara);
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong-Rojong);
3. Dewan Pertimbangan Agung;
4. Mahkamah Agung;
5. Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Dan lain-lain Lembaga.

Demikianlah Pernyataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Djakarta, 5 Mei '66

Wakil Panglima Besar
Komando Ganjang
Malaysia,

Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan-Keamanan a.i./Menteri/Panglima Angkatan Darat,

ttd.,
(Dr. A.H. NASUTION)

DJENDERAL TNI.

ttd.,
(S U H A R T O)

LETNAN DJENDERAL TNI

Menteri/Panglima
Angkatan Laut,

ttd.,

(M O E L J A D I)

LAKSAMANA MUDA (L)

Menteri/Panglima Angkatan Udara,

ttd.,

(RUSMIN NURDIN)

(KOMODOR UDARA)

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,

ttd.,

SUTJIPTO JUDODIHARDJO

KOMISARIS DJENDERAL – POLISI.

**KETETAPAN M.P.R.S. TENTANG SURAT PERINTAH
11-3-1966**

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

**KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA**

No. IX/MPRS/1966

T E N T A N G

**SURAT PERINTAH PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MADJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

**MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Djendral SOEHARTO. Menteri/Panglima Angkatan Darat, merupakan suatu upaya khusus untuk mengatasi antjaman bahaya terhadap keselamatan terhadap djalannja revolusi kewibawaan pimpinan revolusi serta terhadap keutuhan Bangsa dan Negara;
bahwa upaya chusu tersebut diterima setjara positif oleh Rakjat, karena mentjerminkan rasa keadilan menurut suara hati nuraninja dan telah terbukti bermanfaat dalam rangka usaha memenuhi Tri Tuntutan Rakjat;

bahwa upaja khusus itu, jang telah diterima pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setjara bulat, adalah sesuai dengan hukum dasar jang dimaksudkan oleh Undang2 Dasar 1945 dan kegunaannja untuk pengamanan kebidjaksanaan pengembalian kepada pelaksanaan Undang2 Dasar 1945.

setjara murni ;

bahwa untuk kepentingan usaha menjempurnakan lembaga2/aparatur negara sesuai dengan Undang2 Dasar 1945, Surat Perintah tersebut masih perlu diperlakukan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang2 Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERTAMA :**

Menerima baik dan memperkuat kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia jang dituangkan dalam Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan Djendral TNI SOEHARTO/ Menteri Panglima Angkatan Darat dan meningkatkannja mendjadi Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

KEDUA :

Ketetapan tersebut pada sub **PERTAMA** mempunyai daja laku sampai terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil pemilihan umum. Waktu pemilihan umum tersebut ditetapkan dengan ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

KETIGA :

Mempertjajakan kepada Letnan Djendral TNI SOEHARTO Menteri Panglima Angkatan Darat pemegang Ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung djawab wewenang jang terkandung di dalamnja dengan penuh kebidjaksanaan demi pengamanan usaha2 mentjapai tudjuan revolusi dan demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tgl. : 21 Djuni 1966.

**MAJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA.**

Care-Taker/Ketua Pelaksana Pimpinan

Harian

t.t.d.

WALUJO PUSPOJUDO

Major Djendral T.N.I.

Wakil Ketua

t.t.d.

OSA M A L I K I

Sesuai dengan aselinja :

Wakil Kepala Biro - II Permusjawaratan

t.t.d.

Drs AMIN MUSA

Sesuai dengan aselinja

disalin jang ketiga kalinja,

STAF PERTAHANAN-KEAMANAN

LEMBAGA KESEDJARAHAAN

anggauta,

(J i m m y)

**PERNJATAAN
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa, berdasarkan pengu-
muman Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Pebruari 1967
dengan mengingat pernjataan Angkatan Bersendjata Republik
Indonesia tanggal 21 Desember 1966, dengan ini mengeluarkan
pernjataan sebagai berikut :

1. Dengan penuh rasa tanggung djawab memikul segala
konsekwensi atas isi jang tersirat dan tersurat dalam Pengu-
muman Presiden tanggal 20 Pebruari 1967, jang merupakan
suatu upaja tintisan penjelesaian konflik politik.

2. Dengan penjerahan kekuasaan pemerintahan jang me-
rupakan penjerahan keseluruhan kewenangan dan tanggungdja-
wab kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966,
jang didasarkan pada dan sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS
No. XV/MPRS/1966, maka :

1. Penjelesaian konflik politik telah sampai pada upaja rin-
tisan, untuk menudju kepada kemurnian pelaksanaan
Undang-undang Dasar 1945.
2. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, demi kepenting-
an kehidupan demokrasi dan konstitusi, tetap akan meng-
amankan terselenggaranja sidang istimewa MPRS.
Kepada rakjat Indonesia seluruhnja diminta agar mendjaga
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mentjiptakan iklim
dan suasana jang menguntungkan bagi terdjaminnja stabili-
tas nasional, demi keselamatan rakjat, bangsa, negara dan
revolusi, berdasarkan Pantjasila dan Undang-undang Dasar
1945.

3. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia akan me-
ngambil tindakan setjara tegas terhadap siapapun dan golongan
manapun jang tidak mentaati pelaksanaan kekuasaan pemerin-

tahan, setelah berlakunya Pengumuman Presiden tanggal 20 Pebruari 1967.

Demikianlah kebulatan tekad dan ketetapan hati Angkatan Bersendjata Republik Indonesia untuk diabdikan kepada rakjat, bangsa dan revolusi.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 24 Pebruari 1967

Menteri Utama
Bidang Pertahanan-Keamanan,

SOEHARTO

Djenderal - TNI

Wakil Panglima Angkatan
Darat,

M. PANGGABEAN

Letnan Djenderal-TNI

Menteri/Panglima Angkatan
Laut,

MULJADI

Laksamana Laut.

Menteri/Panglima Angkatan
Udara,

RUSMIN NURJADIN

Laksamana Madya Udara

Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian,

SUTJIPTO JUDODIHARDJO

Djenderal Polisi.

DAFTAR SUMBER

A. WAWANCARA

Keterangan Presiden Soeharto tentang SP 11 Maret, wawancara dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen Prof. Dr. Nugroho Notosusanto tgl. 3 - Maret 1977.

Amir Machmud, Jenderal TNI (Pur), Jakarta, 18 Agustus 1971 dan 18 April 1983.

Bambang Widjanarko, Kolonel Marinir (Pur) Jakarta 1984.

Hartini Soekarno, Ny, Jakarta 1984.

Kemal Idris, Letnan Jenderal TNI (Pur), Jakarta, 8 - Mei 1984.

Marzuki Yatim, bekas Menteri Penghubung Alim Ulama, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 7 Juni 1971.

Sabur, M, Brigadir Jenderal (Pur), Jakarta, 1971.

Sarwo Edhie Wibowo, Letnan Jenderal TNI (Pur), Jakarta, 13 September 1982.

Subandrio, Dr, bekas Waperdam I, Jakarta, 29 Mei 1984.
 Sutjipto Judodihardjo, Jenderal Polisi (Pur), Jakarta,
 18 Agustus 1971.

B. SURAT KABAR / MAJALAH

Angkatan Bersenjata, Jakarta 1965 – 1967.
Asian Survey, 1964.
Berita Yudha, Jakarta, 1965 – 1967.
Kompas, Jakarta, 1965 – 1967.
Persepsi, Jakarta, 1979.
Suara Karya, Jakarta 1971.

C. PENERBITAN-PENERBITAN RESMI

Amanat-amanat Penting di saat-saat penghancuran Gestapu,
 Direktorat Penerangan Staf Angkatan Bersendjata 1965.
G.30.S dihadapkan Mahmilub di Jakarta, Pusat Pendidikan
 Kehakiman AD, 1966.
Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, Kop-
 kamtib 1978.
Keputusan Sidang Umum IV MPRS tahun 1966.
 KOMando Operasi Tertinggi, *Rangkaian Pidato dan per-
 nyataan-pernyataan resmi di sekitar peristiwa Gerakan
 30 September*, Jakarta 1965, PN. Balai Pustaka.
*Pidato Presiden Sukarno di depan Sidang Kabinet Dwikora
 15 Januari 1966*.
Pldato Waperdam Dr. Subandrio pada Sapta Warsa GNSI,
 Jakarta 1967.
Press Realese Puspen AD, tanggal 18 Maret 1966.
Puspen AD, Fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September,
 Jakarta 1965, PN. Balai Pustaka.

D. BUKU-BUKU DAN ARTIKEL

Amir Machmud, Naskah Jawaban Pertanyaan-pertanyaan
 LKBN Antara mengenai Super Semar, Jakarta 1984.

Christianto Wibisono, *Aksi-aksi Tritura kisah sebuah partnership*, Jakarta 1970.

Jusuf, M. Letnan Jenderal "Pengalaman saya dengan Supersemar, *Pedoman*, 17 Maret 1973.

Nasution, A.H, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*, Jakarta 1967.

Nugroho Notosusanto, *Tercapainya Konsensus Nasional 1966 – 1969*, Jakarta, Balai Pustaka 1985.

Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta 1985.

Presiden jawab pertanyaan-pertanyaan Sekitar Surat Perintah 11 Maret, *Suara Karya*, 11 Maret 1971.

Soe Hok Gie, *Catatan seorang Demontran*, Jakarta 1983.

Yozar Anwar, *Angkatan 66*, Jakarta 1981.

